



LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

**EDUKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI MELALUI
PROGRAM SEKOLAH TANGGUH BENCANA KEPADA SISWA
MI AN- NUR 2MALANGBONG, KECAMATAN MALANGBONG,
KABUPATEN GARUT**

PEMBIMBING :

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D.

Oleh :

NANDA IMAN SARI

NRP. 20.03.092

PROGRAM STUDI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS
Edukasi Kesiapsiagaan Bencana pada Siswa MI An-Nur
2 Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut

Nama Mahasiswa : Nanda Iman Sari

NRP : 20.03.092

Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing :

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D.

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung**

Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Praktikum Komunitas yang berjudul “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana pada Siswa MI An-Nur 2 Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut” ini dapat praktikan selesaikan tepat pada waktunya.

Keberhasilan dalam Praktikum Komunitas ini tentunya tak lepas dari semua do'a dan usaha dari berbagai pihak yang terlibat, terutama kedua orang tua praktikan yang telah mendukung dengan sepenuh hati, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini praktikan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Suharma, MP., Ph.D. selaku Direktur Politeknik Kesjahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan arahan dan kelengkapan sarana prasarana dalam kegiatan praktikum;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D. selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
3. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Lina Favourita Sutiaputri, Ph. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan ilmunya sehingga pelaksanaan praktikum berjalan lancar dan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya;
5. Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut yang menaungi praktikan selama praktikum komunitas berlangsung dan memberikan berbagai ilmu serta pengalaman yang dapat meningkatkan skill dan pengetahuan praktikan;
6. Kawan-kawan kelompok 4 yang telah bekerja sama dengan baik selama melakukan kegiatan praktikum; serta
7. Semua pihak yang memberi dukungan dalam kegiatan Praktikum Komunitas.

Praktikan menyadari masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan laposan, semoga bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial.

Bandung, Desember 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat	3
1.3.1 Mahasiswa.....	3
1.3.2 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.....	3
1.3.3 Masyarakat dan Pemerintah Lokal	3
1.4 Fokus Praktikum	4
1.5 Metode, Startegi dan Taktik Pekerja Sosial	4
1.5.1 Metode	4
1.5.2 Startegi dan Taktik.....	4
1.5.3 Teknik.....	5
1.6 Teknologi Intervensi Komunitas	6
1.7 Peran Pekerja Sosial	7
1.8 Langkah-langkah Praktikum	8
1.8.1 Tahap Persiapan	8
1.8.2 Tahap Pelaksanaan	11
1.8.3 Tahap Pasca Lapangan	13
1.9 Sistematika Penulisan Laporan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Kajian tentang Komunitas	15
2.1.1 Definisi Komunitas.....	15
2.1.2 Karakteristik Komunitas atau Masyarakat	16
2.1.3 Fungsi Komunitas atau Masyarakat	18
2.1.4 Bentuk Komunitas	19
2.1.5 Aset Komunitas.....	19
iv	
2.2 Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Lokal	21

2.2.2	Struktur Pemerintahan Desa	21
2.2.3	Asas Pemerintahan Desa	24
2.2.4	Tujuan Pengaturan Desa	24
2.2.5	Kewenangan Desa	25
2.2.6	Pendapatan Desa	25
2.3	Masalah Sosial di Desa	26
2.4	Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas	27
2.4.1	Strategi dan Taktik	28
2.4.2	Teknik	30
2.5	Proses Intervensi Komunitas	32
2.6	Kajian Kebencanaan	34
2.7	Manajemen Bencana	35
2.8	Kebijakan Terkait Bencana	37
2.9	Kelompok Rentan	38
2.10	Pendidikan Mitigasi Bencana	39
BAB III DESKRIPSI DESA MALANGBONG		41
3.1	Latar Belakang Desa Malangbong	41
3.1.1	Kondisi Geografis	41
3.1.2	Hidrologi Dan Klimatologi	43
3.1.3	Keadaan Alam Dan Lahan Di Desa Malangbong	44
3.2	Keadaan Khusus Dalam Masyarakat	46
3.2.1	Keadaan Sosial	46
3.2.2	Sarana Dan Prasarana	48
3.2.3	Air Limbah	50
3.2.4	Struktur Kepemimpinan	50
3.2.5	Sistem Nilai Budaya	52
3.2.6	Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial	53
3.2.7	Kemungkinan Menerima Perubahan	53
3.3	Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat	53
3.4	Identifikasi Potensi dan Sumber	54
3.5	Masalah Sosial	55
BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIKUM		57
4.1	Inisiasi Sosial	57
4.1.1	Proses Inisiasi Sosial	58
4.1.2	Hasil Inisiasi Sosial	60
4.2	Pengorganisasian Sosial	60
4.2.1	Proses Pengorganisasian Sosial	61

4.2.2	Hasil Pengorganisasi Sosial	62
4.3	Asesmen	63
4.3.1	Asesmen Awal	63
4.4	Perumusan Rencana Intervensi (Perencanaan Sosial)	71
4.5	Pelaksanaan Intervensi.....	78
4.5.1	Proses Intervensi.....	78
4.5.2	Hasil Intervensi	79
4.6	Evaluasi.....	80
4.6.1	Evaluasi Proses	80
4.6.2	Evaluasi Hasil.....	81
4.7	Terminasi dan Rujukan	81
4.7.1	Terminasi.....	81
4.7.2	Rujukan.....	82
BAB V REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM		84
5.1	Penilaian Pelaksanaan Praktikum	84
5.1.1	Faktor Pendukung	84
5.1.2	Faktor Penghambat.....	85
5.2.	Usulan dan Masukan untuk Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas	86
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		87
6.1	Kesimpulan.....	87
6.2	Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		90

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kondisi Geografis Desa Malangbong	41
Tabel 3. 2 Demografi Desa Malangbong	42
Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Desa Malangbong	43
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Desa Malangbong	43
Tabel 3. 5 Sumber Air Bersih Desa Malangbong	43
Tabel 3. 6 Sumber Air Sungai Desa Malangbong	44
Tabel 3. 7 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	44
Tabel 3. 8 Iklim Desa Malangbong	44
Tabel 3. 9 Jenis dan Kesuburan Tanah	45
Tabel 3. 10 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Malangbong.....	45
Tabel 3. 11 Komoditas Desa Malangbong	45
Tabel 3. 12 Lahan Hutan Desa Malangbong	46
Tabel 3. 13 Prasarana Kesehatan Desa Malangbong.....	46
Tabel 3. 14 Sarana Kesehatan Malangbong	46
Tabel 3. 15 Tingkat Pendidikan Desa Malangbong	47
Tabel 3. 16 Sarana Pendidikan di Desa Malangbong	47
Tabel 3. 17 Akses Listrik Desa Malangbong	48
Tabel 3. 18 Sarana Olahraga Desa Malangbong.....	49
Tabel 3. 19 Tempat Peribadatan Desa Malangbong	49
Tabel 3. 20 Sanitasi Desa Malangbong.....	50
Tabel 3. 21 Struktur Pemerintahan Desa Malangbong	50
Tabel 3. 22 Struktur Ekonomi Desa Malangbong	51
Tabel 3. 23 Potensi dan Sumber Finansial Desa Malangbong	55
Tabel 3. 24 Masalah Sosial Desa Malangbong	56
Tabel 4. 1 Data Permasalahan Sosial di Desa Malangbong	67
Tabel 4. 2 Potensi dan Sumber di Desa Malangbong	68
Tabel 4. 3 Hipotesis Etiologi dan Hipotesis Intervensi.....	70
Tabel 4. 4 Jenis Bencana Desa Malangbong	71
Tabel 4. 5 Rencana Anggaran Biaya	74
Tabel 4. 6 Analisis SWOT Program Tangguh Bencana	75
Tabel 4. 7 Tahap Pelaksanaan Intervensi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembekalan Mekanisme Penerima Bantuan Warmindo	9
Gambar 1. 2 Pembekalan Ketua Prodi Lindayasos	9
Gambar 1. 3 Pembekalan Kepala Dinsos Kabupaten Garut.....	10
Gambar 1. 4 Bimbingan Pra Lapangan	10
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Malangbong	42
Gambar 4. 1 Pelaksanaan MPA	65
Gambar 4. 2 Pelaksanaan ToP.....	72
Gambar 4. 3 Pelaksanaan Intervensi.....	78
Gambar 4. 4 Lokakarya Desa	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Poltekesos Bandung didirikan dengan tujuan untuk memenuhi, menyediakan, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesejahteraan sosial yang mempunyai keahlian sebagai analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana.

Praktikum mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial dilaksanakan 3 (tiga) kali secara bertahap mulai dari Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan untuk membangun kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam mempraktikkan kelima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial; kemudian Praktikum Institusi untuk membangun kompetensi praktik berbasis lembaga; selanjutnya Praktikum Komunitas untuk membangun kompetensi praktik pekerjaan sosial makro melalui intervensi komunitas.

Praktikum Komunitas sebagai praktikum ketiga dari rangkaian praktikum yang harus diikuti mahasiswa, berfokus pada praktik intervensi pekerjaan sosial di komunitas yang tinggal di suatu wilayah geografis dalam batas administrasi pemerintahan desa, sebagai pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Praktikum Komunitas merupakan kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan pada semester VII. Praktik ini dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan berbagai pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dari berbagai mata kuliah dalam kesatuan praktik di komunitas yang menjadi arena praktik pekerjaan sosial. Pembelajaran praktik langsung pada komunitas ini diharapkan dapat mengasah kompetensi mahasiswa serta kepekaan dan empati dalam menangani permasalahan sosial serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada di sekitar komunitas.

Dalam mencapai tujuan tersebut, mahasiswa Poltekesos Bandung melaksanakan Praktikum Komunitas yang berfokus pada praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas atau masyarakat. Praktikum berbasis komunitas dilakukan di Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut dengan waktu

berpraktik selama 40 hari. Praktik ini dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menerapkan berbagai pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dari berbagai mata kuliah.

Untuk mencapai tujuan sebagai SDM Unggul, praktikan melaksanakan pendalaman dan pengembangan masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana. Praktikan mengambil fokus utama edukasi mitigasi bencana kepada anak-anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengembangkan masyarakat dengan mengangkat judul “Edukasi Mitigasi Bencana melalui Program Sekolah Tangguh Bencana Kepada Siswa MI An-Nur 2 Malangbong.”

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas Praktik Pekerjaan Sosial terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum praktikum komunitas adalah meningkatkan kompetensi mahasiswada dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial di komunitas sesuai profil lulusan.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus praktikum komunitas adalah agar mahasiswa memiliki:

- a. Kemampuan untuk menerapkan konsep dan teori-teori praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial di komunitas.
- b. Kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas;
- c. Kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan relasi pertolongan praktik pekerjaan sosial dengan target group dan interest group;
- d. Kemampuan melakukan inisiasi sosial dengan melibatkan masyarakat di dalam memahami profil masyarakat;
- e. Kemampuan melakukan asesmen untuk menemukenali dan menganalisis permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber, serta kebijakan sosial yang relevan.
- f. Kemampuan merumuskan perencanaan intervensi untuk pengembangan komunitas/ masyarakat lokal secara partisipatif;

- g. Kemampuan menerapkan rencana intervensi.
- h. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil intervensi.
- i. Kemampuan melakukan terminasi dan rujukan dalam pengembangan komunitas/masyarakat lokal.
- j. Kemampuan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pengembangan komunitas/ masyarakat lokal.

1.3 Manfaat

Manfaat praktikum komunitas ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi Lembaga Politenik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Lokal.

1.3.1 Mahasiswa

Manfaat praktikum komunitas bagi mahasiswa antara lain:

1. Mahasiswa memiliki pengalaman praktik intervensi pekerjaan sosial komunitas untuk merintis pengembangan karier professional sebagai pekerja sosial.
2. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas.
3. Mahasiswa lebih memahami dan peka terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan komunitas.

1.3.2 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Manfaat praktikum komunitas bagi Poltekesos antara lain:

1. Meningkatkan kualitas kurikulum Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Poltekesos Bandung.
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
3. Memperoleh kesempatan untuk mempromosikan profesi dan pendidikan pekerjaan sosial.

1.3.3 Masyarakat dan Pemerintah Lokal

Manfaat praktikum komunitas bagi Masyarakat dan pemerintah lokal antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya

2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
3. Mendapat masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat.
4. Mendapat masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

1.4 Fokus Praktikum

Fokus praktikum komunitas adalah praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas. Praktikan dapat memfokuskan diri pada salah satu profil lulusan yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Penerima manfaat dari berbagai kegiatan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas dapat difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu sesuai dengan profil lulusan yang dipilih, untuk tujuan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan sosial tertentu.

1.5 Metode, Strategi dan Taktik Pekerja Sosial

Adapun metode, strategi, dan taktik yang digunakan praktikan dalam melaksanakan Praktikum Komunitas yaitu:

1.5.1 Metode

Praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas dilakukan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial yang meliputi antara lain: Pengembangan Masyarakat (Community Development) dan Pengorganisasian Masyarakat (Community Organization).

1.5.2 Strategi dan Taktik

Adapun strategi dan taktiknya sebagai berikut:

1. Kolaborasi (Collaboration), dengan taktik:
 - a. Implementasi, yaitu pelaksanaan kerjasama sistem kegiatan (berbagai pihak yang dilibatkan dalam kegiatan) dengan populasi/kelompok sasaran untuk melakukan perubahan untuk memecahkan masalah yang disepakati dengan alokasi dan distribusi sumber.

- b. Pengembangan kapasitas dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan.
- 2. Kampanye (Campaign), dengan taktik:

Teknik Kampanye (*Campaign*) adalah salah satu teknik yang digunakan praktikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Teknik Kampanye ini diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, pendidikan, dan memanfaatkan media yang ada untuk menyebarkan informasi. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan pendidikan ke masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas.
- 3. Kontes (Contest), dengan taktik advokasi.

1.5.3 Teknik

Teknik-teknik yang digunakan dalam setiap tahapan praktik intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas termasuk kebijakan desa setempat, hendaknya mengutamakan teknik partisipatif, kecuali dalam asesmen dapat dipadukan dengan non-partisipatif untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya. Teknik-teknik yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tahapan praktik yang dilakukan, karakteristik mitra kerja dan situasi sosial dalam lingkungan praktik yang dihadapi dengan merujuk pada berbagai referensi praktik pekerjaan sosial.

- 1. Teknik inisiasi sosial antara lain dengan Community Involvement (CI), percakapan sosial, home visit, dan pertemuan warga
- 2. Pengorganisasian hendaknya mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada yang memiliki peran relevan atau power dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati menjadi fokus praktik.
- 3. Teknik asesmen antara lain dengan teknik-teknik dari metode asesmen partisipatif dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) seperti transect walk dan pemetaan (wilayah, masalah dan sumber), penelusuran sejarah, diskusi klasifikasi kesejahteraan, diskusi terfokus dalam media Community/ Night Meeting Forum (CMF), diagram venn jaringan organisasi; dan teknik-teknik asesmen non-partisipatif seperti mini survey (antara lain Neighborhood Survey Study), wawancara (termasuk The Sustainable Livelihoods Interview), dan studi dokumentasi.

4. Teknik-teknik perencanaan partisipatif antara lain dengan diskusi perencanaan tindakan yang diambil dari *Technology of Participation (ToP)*.
5. Teknik intervensi dipilih disesuaikan dengan hasil asesmen dan pilihan strategi dan taktik (kolaborasi, kampanye, atau konteks) yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan Masyarakat untuk melakukan perubahan.
6. Teknik evaluasi dalam pengembangan Masyarakat hendaknya menggunakan evaluasi partisipatif seperti dengan diskusi terfokus. Disamping itu, dapat dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam atau pengungkapan pengalaman perubahan.

1.6 Teknologi Intervensi Komunitas

Teknologi pekerjaan sosial makro yang digunakan selama pelaksanaan Praktikum Komunitas ini antara lain:

1. Teknik inisiasi sosial antara lain dengan *community involvement*, percakapan sosial, *home visit*, dan pertemuan warga.
2. Pengorganisasian hendaknya mendayagunakan dan menguatkan struktur pengorganisasian masyarakat dan pemimpin lokal yang ada yang memiliki peran relevan atau power dalam pengembangan masyarakat untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan sosial dari populasi target yang disepakati menjadi fokus praktik.
3. Teknik asesmen antara lain dengan teknik-teknik dari metode asesmen partisipatif dalam *Participatory Rural Appraisal (PRA)* seperti *transect walk* dan pemetaan (wilayah, masalah, dan sumber), penelusuran sejarah, diskusi klasifikasi kesejahteraan, diskusi terokus dalam media *Community/Night Meeting Forum (CMF)*, *Metode Participatory Assesment (MPA)*, diagram venn jaringan organisasi; dan teknik-teknik asesmen non-partisipatif seperti mini survey, wawancara, dan studi dokumentasi.
4. Teknik-teknik perencanaan partisipatif antara lain dengan diskusi perencanaan tindakan yang diambil dari *Technology of Participatory (TOP)* dan *Focus Group Discussion (FGD)*.
5. Teknik intervensi dipilih disesuaikan hasil asesmen dan pilihan strategi dan taktik (Kolaborasi dan Kampanye) yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan.
6. Teknik evaluasi dalam pengembangan masyarakat hendaknya menggunakan evaluasi partisipatif seperti dengan diskusi terfokus. Disamping itu, dapat dilengkapi dengan teknik wawancara mendalam atau pengungkapan

pengalaman perubahan.

1.7 Peran Pekerja Sosial

Pada kegiatan praktikum Komunitas praktikan mengasumsikan diri sebagai calon pekerja sosial professional yang berperan sebagai:

1. Fasilitator

Pekerja sosial memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pemecahan masalah seseorang atau kelompok. Dalam pemecahan masalah sosial yang ada di Desa Malangbong, praktikan memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat memecahkan masalah. Mulai dari tahap asesmen, rencana intervensi, hingga intervensi yang dilakukan.

Pada tahap asesmen praktikan memfasilitasi masyarakat dengan memberikan forum diskusi untuk menggali masalah sosial apa saja yang ada di Desa Malangbong. Penggalan masalah yang ada di masyarakat biasa disebut dengan asesmen. Asesmen yang dilakukan praktikan terbagi menjadi dua tahap yaitu asesmen awal dan asesmen lanjutan. Setelah praktikan melakukan asesmen, praktikan kemudian membuat rencana intervensi bersama dengan masyarakat menggunakan teknik *Technology of Participatory* (TOP). Dalam penyusunan rencana intervensi dengan menggunakan teknik *Technology of Participatory* (TOP) praktikan menyediakan ruang diskusi untuk masyarakat agar dapat merancang intervensi. Dalam teknik *Technology of Participatory* (TOP) ini praktikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan nama kegiatan, bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, dan penanggung jawab kegiatan. Semua dikembalikan kepada masyarakat agar nantinya dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat tidak terpaksa.

2. Broker

Pekerja sosial menghubungkan kebutuhan kelompok dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Untuk mempersiapkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan intervensi praktikan menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyuluhan mengenai potensi bencana dan mitigasi bencana seperti Taruna Siaga Bencana Kabupaten Garut.

3. Pendidik (*Educator*)

Peran *educator* pekerja sosial dalam intervensi komunitas ialah menjadi informan yang baik dan jelas pada penyampaian informasi agar sasaran perubahan dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai topik atau isu yang dibahas.

4. Perencana Sosial (*Social Planer*)

Pekerja sosial selaku *social planner* bertugas untuk mengumpulkan data tentang masalah sosial yang terjadi, menganalisis data, menyajikan alternatif tindakan penanganan masalah, dan mengembangkan program.

1.8 Langkah-langkah Praktikum

Pelaksanaan praktikum dilakukan secara kelompok. Penentuan kelompok dilakukan oleh Prodi Lindayasos, dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 6 – 7 orang per kelompok, yang akan dibimbing oleh satu atau dua orang dosen pembimbing praktikum. Sistem pelaksanaan Praktikum Komunitas terdiri dari tiga tahap yaitu:

1.8.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pedoman Praktikum Komunitas

Sosialisasi pedoman praktikum komunitas dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 secara luring, di ruangan Gedung D.1.2 dan D. 1.3. hasil kegiatan yaitu sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan praktikum berdasarkan pedoman praktikum komunitas. Kegiatan dihadiri oleh kepala Prodi Lindayasos, Kepala Laboratorium Lindayasos, bapak dan ibu sebagai Dosen Prodi Lindayasos.

2. Pembekalan Praktikum Komunitas

Pembekalan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta Praktikum Komunitas dan dosen pembimbing. Pembekalan dilaksanakan sebelum praktikan turun ke lapangan. Tujuan pembekalan praktikum adalah diperolehnya kejelasan mengenai substansi dan proses Praktikum Komunitas yang akan dilakukan serta memperoleh informasi awal tentang isu-isu terkini terkait kebutuhan praktikum. Pembekalan praktikum dilaksanakan dengan pemberian materi, antara lain oleh:

- a. Pembekalan Pertama terkait mekanisme penetapan penerima bantuan sosial warmindo, pada hari Rabu, 25 oktober 2023 di Auditorium kampus. Yang dihadiri oleh Direktur Poltekesos, kepala prodi Pekerja Sosial, Kepala Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, kepala prodi Rehabilitasi Sosial. Serta seluruh mahasiswa Angkatan 2020. Hasil kegiatan ini adalah menjelaskan terkait kriteria dan syarat KPM atau keluarga penerima manfaat yang akan praktikan asesmen di lingkungan Desa.



Gambar 1. 1 Pembekalan Mekanisme Penerima Bantuan Warmindo

- b. Pembekalan Kedua oleh Ketua Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan sosial. Dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 di Gedung D ruangan D.1.2. hasil dari kegiatan ini menjelaskan terkait teknis keberangkatan ke Garut.



Gambar 1. 2 Pembekalan Ketua Prodi Lindayasos

- c. Pembekalan ketiga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, dihadiri 2

prodi yang melaksanakan praktikumnya di Kabupaten Garut yaitu Prodi Rehabilitasi Sosial dan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Hasil kegiatannya adalah menjelaskan terkait implementasi kebijakan dan program Pembangunan bidang kesejahteraan sosial, masalah tantangannya di Kabupaten Garut, dengan sub bahasan yaitu penyebaran populasi PPKS di Kabupaten Garut, dan Program unggulan dalam meningkatkan layanan bidang kesejahteraan sosial.



Gambar 1. 3 Pembekalan Kepala Dinsos Kabupaten Garut

- d. Bimbingan Pra lapangan oleh Dosen Pembimbing Praktikum Komunitas. Dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023. Bimbingan praktikum membahas tentang hal-hal yang harus dilaksanakan oleh praktikan sesuai dengan pedoman praktikum oleh dosen pembimbing kepada praktikan untuk membuat matriks kegiatan praktikum dan membuat buku catatan harian.



Gambar 1. 4 Bimbingan Pra Lapangan

1.8.2 Tahap Pelaksanaan

Praktikum Komunitas Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial adalah proses intervensi komunitas yang memfokuskan pada analisis jaminan sosial, analisis pengelolaan sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana.

a. Pelepasan Mahasiswa Praktikum Komunitas

Kegiatan pelepasan mahasiswa praktikum komunitas oleh Lembaga Poltekesos Bandung kepada masing-masing program studi sarjana terapan Poltekesos Bandung dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Poltekesos Bandung, Kepala Prodi Pekerja Sosial, Kepala Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Kepala Prodi Rehabilitasi Sosial, Bapak-Ibu Dosen dan seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan Praktikum Komunitas.

b. Penerimaan Mahasiswa Praktikum Komunitas

Penerimaan mahasiswa praktikan dari Prodi Lindayasos dan Prodi Rehsos ke Pemerintah Kabupaten Garut di Pendopo Bupati yang dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Garut beserta jajarannya, Direktur Poltekesos Bandung, Ketua Prodi Lindayasos beserta dosen-dosen pembimbing praktikum, Kepala Kecamatan Malangbong, Kepala Desa di 14 Desa Kecamatan Malangbong, dan seluruh mahasiswa praktikum komunitas tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan serta mekanisme praktikum yang akan dilaksanakan dan mempresentasikan rencana kerja selama melakukan Praktikum Komunitas.

c. Pengenalan Komunitas

Pengenalan Komunitas dilaksanakan pada hari Kamis, 2 November 2023. Pada kegiatan tersebut praktikan dan seluruh aparat Desa Malangbong melakukan perkenalan aparat desa juga dilakukan pengenalan terhadap wilayah, potensi dan sumber Desa Malangbong.

d. Inisiasi Sosial

Inisiasi sosial adalah kegiatan yang mengawali praktikum komunitas, yang merupakan kegiatan memasuki, melakukan kontak pendahuluan, memahami karakteristik Masyarakat, membangun relasi dengan Masyarakat hingga terbangun kesiapan dan kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan masyarakat. Kerjasama yang merespon isu

penting perkenalan dengan kebutuhan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta pencegahan atau penanganan permasalahan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Masyarakat. Kegiatan inisiasi sosial dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 4 September 2023.

e. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan proses dimana mahasiswa mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi sosial lokal, melibatkan yang potensial untuk menggerakkan Masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dalam Upaya pengembangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, mencegah dan menangani permasalahan sosial di Masyarakat. Dengan demikian mahasiswa melibatkan, bekerja bersama Masyarakat, sejak awal. Pengorganisasian Sosial dilaksanakan pada tanggal 31- Oktober – 4 September 2023

f. Kegiatan Asesmen

Praktikan menggali informasi terkait permasalahan, potensi dan sumber yang terdapat di Desa Malangbong. Kegiatan asesmen dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 11 November 2023. Praktikan melakukan asesmen dengan menggunakan tools *Transect Walk* dan Pemetaan, *Direct observation*, studi dokumentasi, Diagram Venn, MPA, analisis pohon masalah, teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

g. Perencanaan Intervensi

Perumusan rencana intervensi pada tanggal 12 s.d 18 November 2023. Pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta implikasi masa depan atas keputusan yang dibuat. Rencana intervensi sebaiknya memuat perencanaan strategis yang dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib dalam pemecahan masalah.

h. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rencana intervensi yang telah disusun. Secara umum, pelaksanaan intervensi bertujuan mencapai perubahan penting bagi komunitas dengan adanya perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

dalam pemecahan masalah. Pelaksanaan Intervensi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 25 November 2023.

i. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai apakah tujuan intervensi tercapai atau tidak dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan intervensi. kegiatan evaluasi dilakukan pada tanggal 3 s.d 7 Desember 2023.

j. Terminasi

Terminasi dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Desember 2023. Terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan Masyarakat atau kelompok sasaran. Tahap ini harus dilakukan karena program sudah harus dihentikan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Praktikan mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat yang telah menerima praktikan dengan baik dan permohonan maaf jika ada kesalahan selama melaksanakan kegiatan praktikum komunitas.

k. Rujukan

Rujukan merupakan tindak lanjut dari proses pengakhiran yang membutuhkan keberlanjutan intervensi/proses pertolongan yang sudah dilaksanakan dengan menyalurkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial atau sistem sumber lain yang dapat melanjutkan proses intervensi.

1.8.3 Tahap Pasca Lapangan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan tahap pasca lapangan pada kegiatan praktikum komunitas adalah sebagai berikut.

- a. Finalisasi penyusunan laporan
- b. Ujian Lisan Praktikum
- c. Perbaikan dan Penyerahan Laporan
- d. Supervisi

1.9 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang terdapat didalam sebuah laporan. Berikut merupakan sistematika penulisan laporan Praktikum Institusi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, sasaran kegiatan praktikum, waktu dan lokasi praktikum, pelaksanaan praktikum, dan sistematika laporan.

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA: meliputi dasar hukum jaminan sosial, tinjauan konsep jaminan sosial, tinjauan tentang jaminan sosial masyarakat, tinjauankonsep pekerja sosial.
- BAB III : PROFIL KOMUNITAS, meliputi latar belakang sejarah, gambaran masyarakat secara geografis, gambaran masyarakat secara demografis, kehidupan interaksi sosial masyarakat, identifikasi potensi dan sumber, dan masalah sosial utama yang nampak.
- BAB IV : PELAKSANAAN PRAKTIKUM KOMUNITAS, meliputi inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen awal, asesmen lanjutan, perumusan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi dan rujukan.
- BAB V : REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM, Berisi laporan kegiatan yang membuat tentang refleksi lapangan meliputi pencapaian tujuan dan manfaat praktikum yang dirasakan praktikan, faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan praktikum, usulan dan masukan untuk praktik pekerjaan sosial khususnya terkait dengan metode dan teknik intervensi komunitas.
- BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, Berisi kesimpulan tentang praktikum komunitas, hasil yang telah dan belum dicapai dalam praktikum. Rekomendasi ditujukan kepada pihak mana, isi teknis rekomendasi, serta Langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian tentang Komunitas

2.1.1 Definisi Komunitas

Istilah komunitas dalam penggunaannya sehari-hari sering disama artikan dengan istilah masyarakat. Komunitas berasal dari bahasa latin “*communitas*” yang berarti kesamaan, kemudian diturunkan menjadi “*communis*” yang berarti “sama, public, dibagi oleh semua pihak”. Beberapa pendapat ahli pun ada yang menyamakan penggunaan istilah komunitas dan masyarakat. Berikut adalah beberapa definisi tentang komunitas menurut para ahli. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografis dan atau nilai-nilai dan kepentingan bersama; anggota masyarakat dikenal berinteraksi bersama; anggota masyarakat dikenal berinteraksi satu sama lain; fungsi masyarakat dalam struktur sosial tertentu; dan masyarakat menciptakan norma-norma, nilai-nilai dan lembaga-lembaga sosial.

Komunitas yang dibahas adalah tentang struktur dan proses komunitas. Menurut Soerjono Soekanto (2012:132), Istilah *Community* dapat diterjemahkan sebagai:

Masyarakat setempat yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat.

Menurut Kenneth Wilkinson dalam Isbandi Rukminto Adi (2008: 117) di mana mereka melihat komunitas sekurang-kurangnya mempunyai tiga unsur dasar, yaitu:

- a. Adanya batasan wilayah atau tempat (*territory or place*).
- b. Merupakan suatu “organisasi sosial” atau institusi sosial yang menyediakan kesempatan untuk para warganya agar dapat melakukan interaksi antarwarga secara reguler; dan
- c. Interaksi sosial yang dilakukan terjadi karena adanya minat ataupun kepentingan yang sama (*common interest*)

Menurut Mac Iver dalam Soerjono Soekanto, unsur-unsur dalam sentiment community adalah :

- a. Seperasaan
Unsur seperasaan muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan
- b. Sepenanggungan
Sepenanggungan diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya
- c. Saling memerlukan
Unsur saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis.

Menurut McMillan dan Chavis (1986) mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama.

Definisi komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Komunitas dapat didefinisikan dari lokasi, ras, etnik, pekerjaan, ketertarikan pada suatu masalah-masalah atau hal lain yang mempunyai kesamaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunitas adalah suatu unit atau kesatuan sosial atau sekelompok orang yang hidup bersama yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama dan memiliki keterterikan yang sama sehingga dapat hidup saling berdampingan dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi satu sama lain.

2.1.2 Karakteristik Komunitas atau Masyarakat

Komunitas ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota-anggota kelompok masyarakat tersebut. Adapun ciri-cirinya menurut Zainal Abidin (2012) yaitu adanya daerah/batas tertentu, adanya manusia yang bertempat tinggal, adanya kehidupan masyarakat dan adanya hubungan sosial antara anggota kelompoknya. Kriteria utama adanya suatu komunitas menurut Soejono Soekanto (2012) adalah terdapat hubungan sosial (social relationship) antar anggota suatu kelompok. Komunitas tersebut menunjuk pada bagian Masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis)

dengan batas-batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Menurut Soejono Soekanto (2012), ciri-ciri dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama .
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Untuk menentukan identitasnya, menurut Soerjono Soekanto, buku Sosiologi: Suatu Pengantar (2003), masyarakat mempunyai ciri-ciri yang khas. Adapun daftar ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Hidup Berkelompok

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. Sebab, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.

b. Melahirkan Kebudayaan

Ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu dipelihara dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

c. Mengalami Perubahan

Beragam latar belakang yang menyatukan tiap-tiap individu menjadi suatu masyarakat, membuat manusia mengalami perubahan. Perubahan ini dianggap sebagai upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Sebagai contoh, masyarakat beralih menggunakan surat elektronik untuk menggantikan surat kertas, ketika menerima pengaruh perkembangan teknologi.

d. Berinteraksi

Interaksi adalah hal yang mendasar dari terbentuknya masyarakat. Interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup.

e. Terdapat Kepemimpinan

Masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang diberlakukan di wilayahnya. Contohnya, dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi keluarganya. Istri dan anak patuh kepada ayah atau suaminya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam masyarakat, ada peran pemimpin yang membantu menyatukan individu-individu.

f. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat. Ketidakeimbangan hak dan kewajiban masing-masing individu atau kelompok menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial didasari atas kasta sosial, usia, suku, pendidikan, dan beberapa aspek lain yang memicu keberagaman.

2.1.3 Fungsi Komunitas atau Masyarakat

Perbedaan definisi dari masyarakat pada umumnya tidak mengubah fungsi masyarakat. Fungsi komunitas/masyarakat dalam kehidupan manusia sangat penting. Terdapat lima fungsi masyarakat menurut Netting, Kettner dan McMurtry (2004:130-131). Berikut adalah penjabaran dari lima fungsi tersebut:

- a. Fungsi Produksi, Distribusi dan Konsumsi (Production, Distribution, Consumption). Kegiatan-kegiatan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan sejenisnya.
- b. Fungsi Sosialisasi (Socialization). Meneruskan atau mewariskan norma-norma, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh orang-orang yang berinteraksi di dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengawasan Sosial (Social Control). Masyarakat senantiasa mengharapkan warganya untuk mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang dianut melalui penetapan hukum, peraturan dan sistem-sistem penegakkannya.
- d. Fungsi Partisipasi Sosial (Social Participation). Masyarakat menyediakan wahana bagi para anggotanya untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingannya guna terbangunnya jaringan dukungan dan pertolongan melalui interaksi dengan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok, asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi.
- e. Fungsi Gotong Royong (Mutual Support). Keluarga-keluarga, teman-teman, para tetangga, kelompok sukarela dan asosiasi-asosiasi profesional yang

tergabung dalam sebuah masyarakat biasanya saling membantu satu sama lain.

2.1.4 Bentuk Komunitas

Menurut Mac Iver dalam Mansyur, keberadaan communal code (keberagaman aturan dalam kelompok) mengakibatkan komunitas terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Primary group, hubungan antar anggota komunitas lebih intim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relative lama Contoh: keluarga, suami-istri, pertemanan, guru-murid, dan lain-lain.
- b. Secondary group, hubungan antar anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang banyak dan dalam jangka waktu relatif singkat. Contoh: perkumpulan profesi, atasan-bawahan, perkumpulan minat/hobi, dan lain-lain Dalam hal ini Komunitas Roemah Baling, dapat dikategorikan sebagai bentuk gemeinschaft of mind atau didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran untuk membudayakan kegemaran membaca masyarakat Kota Palembang dan menjadi bagian dari secondary group dimana komunitas ini terbentuk karena kesamaan minat anggotanya.

2.1.5 Aset Komunitas

Menurut Green dan Heines (dalam Rukminto, 2007:106) pendekatan untuk melihat aset komunitas merupakan peralihan cara pandang praktisi pengembangan masyarakat yang sebelumnya lebih mengarah pada kebutuhan, akan tetapi sekarang lebih memfokuskan pada aset komunitas. Ada 7 modal yang merupakan aset komunitas, yaitu :

- a. Modal fisik

Modal fisik merupakan salah satu modal dasar yang terdapat dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat yang hidup secara tradisonal maupun modern. Green dan Heines (dalam Rukminto, 2007:36) melihat dua kelompok utama dari modal fisik adalah bangunan dan infrastruktur. Bangunan seperti rumah, took, ataupun gedung. Sedangkan infrastruktur seperti jembatan, sarana air bersih, ataupun jaringan internet. Bangunan dan infrastruktur merupakan aset yang penting dalam masyarakat dan seringkali menjadi salah satu indikator dari berkembang atau tidaknya suatu komunitas.

b. Modal Finansial

Modal finansial merupakan dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut. Modal finansial biasanya digunakan komunitas untuk mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan. Peminjaman dana ataupun modal usaha merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sumber dana finansial.

c. Modal Lingkungan

Modal lingkungan dapat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Aset lingkungan yang dimiliki masyarakat memiliki begitu banyak manfaat, seperti daerah resapan hujan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya banjir di suatu wilayah tertentu.

d. Modal teknologi

Modal teknologi yaitu yang terkait dengan ketersediaan teknologi yang tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekadar teknologi digital yang canggih yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Pemilihan teknologi yang tepat guna menjadi lebih prioritas, teknologi mana yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

e. Modal manusia

Modal manusia berbicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik yang sederhana maupun yang maju. Menurut Green dan Heines (dalam Rukminto, 2013:253) modal manusia, adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja yang berpengaruh terhadap produktivitas mereka. 6. Modal Sosial Modal sosial adalah perekat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, yang dihubungkan dengan norma dan aturan yang menyatukan anggota masyarakat yang menjadi bagiannya dan mengatur pola perilaku, unsur kepercayaan dan jaringan atau hubungan antara masyarakat dengan kelompok lain.

f. Modal spiritual

Modal spiritual meningkatkan tujuan hidup dan dorongan untuk bergerak membantu sesama, yang pada akhirnya akan memberikan makna hidup

yang lebih baik. Modal spiritual dapat meningkatkan keyakinan komunitas kepada Tuhan sehingga permasalahan yang ada di komunitas akan mudah diatasi karena dapat menguatkan individu yang memiliki kelemahan dalam beberapa modal asset yang lainnya.

2.2 Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Lokal

2.2.1 Definisi Pemerintahan Desa

Sugiman (2018:84) menjelaskan bahwa desa merupakan “kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan”. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2, yaitu “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dari kesatuan masyarakat untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Struktur Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dari kepala desa telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perangkat desa terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

a. Sekretariat desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dengan dibantu unsur staf sekretariat atau yang disebut kepala urusan. Sekretariat desa maksimal terdiri dari tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, atau minimal terdiri dari dua urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan.

b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun. Jumlah kepala dusun dalam sebuah desa ditentukan secara proporsional antara kepala dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa dalam pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh kepala seksi. Pelaksana tugas maksimal terdiri atas tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, atau minimal terdiri atas dua seksi, antara lain seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya. Struktur organisasi desa swasembada wajib memiliki tiga urusan dan tiga seksi, desa swakarya dapat memiliki tiga urusan dan tiga seksi, sedangkan desa swadaya memiliki dua urusan dan dua seksi. Berikut merupakan susunan organisasi pemerintah desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:

a. Kepala desa

Kepala desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; penataan administrasi perangkat desa; penyedia prasarana perangkat desa dan kantor; penyiapan rapat; serta pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; verifikasi administrasi keuangan; serta administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berfungsi untuk mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan berfungsi untuk melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; menyusun rancangan regulasi desa; pembinaan masalah pertanahan; pembinaan ketentraman dan ketertiban; pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; serta tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; serta melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjunjung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.2.3 Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, serta keberlanjutan.

2.2.4 Tujuan Pengaturan Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 4, pengaturan desa memiliki tujuan, sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.5 Kewenangan Desa

Kewenangan desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6 Pendapatan Desa

Pendapatan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

bersumber dari anggaran dana sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan hasil desa lainnya;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta
- g. Pendapatan desa lainnya yang sah.

2.3 Masalah Sosial di Desa

Rubington dan Weinberg (1999) mendefinisikan masalah sosial adalah suatu situasi yang diduga atau dianggap oleh banyak orang bertentangan dengan nilai sehingga mereka setuju adanya tindakan untuk mengatasi atau menghilangkan situasi tersebut.

Sedangkan Horton dan Leslie mendefinisikan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan dan menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif. Pekerja sosial mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok, atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peran-peran sosialnya.

Masalah bencana apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah sosial seperti kesehatan baik fisik maupun mental dan kemiskinan. Kejadian pasca bencana menyisakan trauma atau post traumatic syndrome, terutama pada anak-anak. Anak-anak memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengalami depresi dan kecemasan akibat bencana (Budirahayu, 2019).

Masyarakat miskin yang ada di pedesaan, terutama, menjadi yang paling terdampak jika terjadi bencana. Hal ini terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

Pertama, Bagi rakyat miskin, karena tekanan-tekanan ekonomis yang sangat berat dan bersifat darurat, memiliki sedikit sekali pilihan-pilihan untuk memilih atau tinggal di daerah yang aman.

Kedua, Karena posisi ekonomi dan keterbatasan aksesnya terhadap sumber daya (alat transportasi, saluran komunikasi, dll), maka orang miskin sangat sulit untuk melakukan evakuasi diri ketika terjadi bencana.

Ketiga, Karena orang-orang miskin kesulitan mengakses pendidikan dan informasi, sehingga mereka kurang pengetahuan pula untuk mengenali tanda-tanda bencana dan sedikit tahu cara menghindarinya.

Masyarakat miskin, terutama di pedesaan akan semakin terpuruk jika mengalami bencana. Mereka dapat kehilangan pekerjaan dan karena itu pendapatan menurun, daya beli melemah. Hal ini dapat menurunkan sektor ekonomi yang ada di desa.

2.4 Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Community organization adalah proses dimana komunitas mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan, mengambil tindakan, dan melalui proses ini, mengembangkan sikap dan praktik kooperatif dan kolaboratif dalam komunitas. (Murray G. Ross, 1967). Menurut Jack Rothman, ada tiga jenis dari Community Organization:

a. Locality development

Sebuah metode bekerja dengan organisasi masyarakat. Awalnya digunakan oleh gerakan Rumah Permukiman, fokus utamanya adalah pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kepemimpinan, gotong royong, dan pendidikan kerakyatan dianggap sebagai komponen penting dalam proses partisipatif ini. Pengembangan lokalitas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan populasi sasaran di wilayah yang ditentukan (misalnya, lingkungan, blok perumahan, rumah petak, sekolah, dll.).

b. Social planning dan social policy

Metode bekerja dengan populasi besar. Fokusnya adalah dalam mengevaluasi kebutuhan kesejahteraan dan layanan yang ada di daerah tersebut dan merencanakan kemungkinan cetak biru untuk penyampaian layanan yang lebih efisien untuk masalah sosial. Ini adalah model responsif terhadap kebutuhan dan sikap masyarakat. Misalnya. Perumahan, asuransi kesehatan, pendidikan terjangkau, dll.

a. Social action

Strategi yang digunakan oleh kelompok, sub komunitas, atau bahkan organisasi nasional yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menghadapi struktur kekuasaan yang dominan dengan menggunakan konflik sebagai metode untuk memecahkan masalah mereka yang terkait dengan ketidaksetaraan dan deprivasi. Misalnya. Perubahan sistem struktural dalam kebijakan sosial yang membawa kesenjangan antara orang-orang dari kondisi sosial ekonomi yang berbeda dalam hak-hak sosial seperti kebijakan pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dll.

Community development adalah pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, inklusi, keadilan sosial, penentuan nasib sendiri dan tindakan kolektif (Kenny, 2007). Community development menganggap anggota masyarakat sebagai ahli dalam kehidupan

dan komunitas mereka, dan menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan komunitas. Program pengembangan masyarakat dipimpin oleh anggota masyarakat di setiap tahap - mulai dari memutuskan masalah hingga memilih dan melaksanakan tindakan, dan evaluasi. Pengembangan masyarakat memiliki fokus eksplisit pada redistribusi kekuasaan untuk mengatasi penyebab ketidaksetaraan dan ketidakberuntungan. (Australian Institute of Family Studies, 2021).

Community Development bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. *Community Development* memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan. *Community Development* memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama – *group action* – di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. (Ardiwinata, 2021).

2.4.1 Strategi dan Taktik

Strategi dan teknik yang digunakan dalam intervensi pekerjaan sosial dengan komunitas adalah sebagai berikut:

a. Kolaborasi

Kolaborasi adalah kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antarindividu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama ataupun untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi. Adapun taktik yang digunakan dalam berkolaborasi adalah implementasi dan pengembangan kapasitas. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengembangan kapasitas adalah peningkatan kemampuan masyarakat dan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali masyarakat, maka diperlukan dorongandorongan

untuk menyadarkan kembali peran yang dimiliki masyarakat melalui pengembangan kapasitas.

b. Kampanye

Kampanye menurut Rogers dan Storey adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Dalam kampanye, ada komunikasi dua arah yang memiliki dua pengaruh, yakni pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung menggunakan media yang membentuk pendapat umum kemudian memberi dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut. Taktik yang digunakan dalam kampanye adalah edukasi, pemanfaatan media, dan persuasi. Edukasi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) sama artinya dengan (perihal) pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara khusus edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Seseorang yang melakukan proses didik kepada seseorang adalah pendidik. Sedangkan seseorang yang mendapatkan proses didik dari seorang pendidik biasa disebut didikan. (Mustofa, 2021). Sedangkan persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Bila berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipercayai. Persuasif merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dimengerti dan dipercayai oleh orang lain.

c. Kontes

Taktik yang digunakan dalam kontes adalah advokasi. Pengertian dari advokasi menurut Julie Stirling adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap atau berproses. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi

orang lain dengan maksud mengubah kebijakan publik. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah terorganisir maupun terarah sehingga lebih mudah tercapai.

2.4.2 Teknik

Teknik yang digunakan dalam intervensi pekerjaan sosial dalam komunitas adalah sebagai berikut:

a. **Inisiasi Sosial**

Inisiasi Sosial adalah kontak awal sebelum melakukan asesmen. Kerjasama yang merespon isu penting berkenaan dengan kebutuhan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta pencegahan atau penanganan permasalahan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

b. **Community Involvement**

Proses sosial dimana kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan bersama yang tinggal di wilayah geografis tertentu secara aktif mengejar identifikasi kebutuhan mereka, mengambil keputusan dan membangun mekanisme untuk memenuhi kebutuhan ini. Community involvement juga melibatkan penduduk setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek pembangunan atau dalam pelaksanaannya.

c. ***Transect Walk***

Transect Walk adalah latihan kelompok yang mengharuskan berjalan di antara dua titik untuk menyeberang atau transek suatu komunitas. Kelompok mengeksplorasi sumber daya lingkungan dan sosial, kondisi dan sistem dengan mengamati, menanya, mendengarkan, melihat dan menghasilkan diagram transek. (Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2021). *Transect Walk* mengungkapkan lokasi dan distribusi sumber daya, infrastruktur, interaksi sosial, lanskap, pola penggunaan lahan, dan berbagai aktivitas yang terjadi di dalam komunitas atau wilayah sasaran. Latihan ini melibatkan anggota kelompok berbicara dengan orang-orang di masyarakat dan observasi aktif lingkungan untuk menangkap informasi kunci (misalnya, aset, bahaya, mata pencaharian) yang kemudian digunakan dalam klasifikasi zona (yaitu, penggunaan lahan, kerentanan, kondisi sosial). Percakapan sepanjang cara menawarkan kesempatan untuk mendengar perspektif dari beragam anggota masyarakat dan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana karakteristik fisik dan sosial dan hubungan telah berubah dari waktu ke waktu.

d. *Home Visit*

Kunjungan rumah adalah cara penyampaian layanan di seluruh setting praktik pekerjaan sosial berdasarkan keuntungan memberikan layanan kepada klien dalam "lingkungan alami" mereka. Kunjungan rumah memberikan kontribusi yang beragam sebagai komponen dari keseluruhan layanan kepada klien, mulai dari kunjungan satu kali dalam konteks layanan disampaikan dalam pengaturan lain ke rumah kunjungan sebagai metode utama pemberian layanan. Tujuan utama kunjungan rumah untuk mungkin proses, sumber daya, atau fokus risiko (Allen & Tracy, 2004) dan dapat berubah seiring berjalannya waktu hubungan pekerja sosial-klien. (Allen & Tracy, 2008).

e. *Community Meeting*

Rembuk warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga di yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan dan penjangkaran aspirasi masyarakat bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan. (Kecamatan Sukajadi, 2021).

f. *Sustainable Livelihood Framework*

Kerangka penghidupan berkelanjutan menyajikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat, dan hubungan khas antara faktor faktor tersebut. Hal ini dapat digunakan baik dalam perencanaan kegiatan pembangunan baru dan menilai kontribusi terhadap keberlanjutan mata pencaharian yang dibuat oleh kegiatan yang ada. (Department for International Development United Kingdom, 2021).

Pendekatan penghidupan berkelanjutan memfasilitasi identifikasi prioritas praktis untuk tindakan yang didasarkan pada pandangan dan kepentingan mereka yang terkait tetapi bukan merupakan obat mujarab. Ini tidak menggantikan alat lain, seperti pembangunan partisipatif, pendekatan sektoral, atau pembangunan pedesaan terpadu. Namun, itu membuat hubungan antara orang-orang dan lingkungan pendukung secara keseluruhan yang mempengaruhi hasil dari strategi mata pencaharian. Ini memberi perhatian pada potensi yang melekat pada orang-orang dalam hal keterampilan mereka, jaringan sosial, akses ke sumber daya fisik dan keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi lembaga inti (Serrat, 2017).

g. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD merupakan akronim dalam bahasa Inggris, yang bila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia berarti “Diskusi Kelompok Terarah”. FGD merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif melalui wawancara dan pembahasan dalam kelompok. Teknik ini merupakan pengembangan dari teknik curah pendapat dan paling umum digunakan dalam metode Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Perjajakan Cepat Kondisi Pedesaan (PCKP). Dengan teknik ini FGD akan lebih mudah dalam membangkitkan peran serta masyarakat dalam menggali, mengumpulkan informasi permasalahan yang ada, keinginan dan kebutuhan masyarakat sekaligus alternatif pemecahan masalah. Adapun tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap suatu permasalahan (Kresno dkk, 1999).

h. *Technology of Participation*

Technology of participation (ToP) merupakan suatu teknik perencanaan pembangunan masyarakat secara partisipatif, yang menempatkan semua pihak pada kedudukan yang sama dalam memberikan ide dan mengapresiasi ide orang lain (Keneth H. Elison, 1997). *Technology of Participation (ToP)* adalah suatu teknik yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian suatu program pemberdayaan (Kalesaran et al., 2015). Teknologi ini bertujuan untuk mengeksplorasi inisiatif- inisiatif, sikap kepemimpinan, dan tanggung jawab dari seluruh anggota kelompok.

2.5 Proses Intervensi Komunitas

Lippit, Watson, dan Westley dalam Isbandi Rukminto (2012) menyatakan bahwa agar perubahan ke tingkat yang lebih baik berhasil dilakukan, ada suatu proses yang harus dilalui, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Pengembangan Kebutuhan akan Perubahan. Sebelum proses perubahan berencana dimulai, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat harus diterjemahkan sebagai ‘kesadaran mengenai masalah yang ada (problem awareness). Hal ini merupakan inti dari keinginan untuk berubah dan keinginan untuk mencari bantuan di luar sistem. Pekerja sosial hadir sebagai

pelaku perubahan di luar sistem untuk membantu dan menstimulasi masyarakat untuk memikirkan apa yang mereka butuhkan.

- b. Tahap Pemantapan Relasi Perubahan, pengembangan relasi kerja dengan pelaku perubahan (community worker) merupakan isu utama pada fase ini. Pembentukan dan pembinaan relasi dengan warga masyarakat sangat diperlukan untuk dapat bekerja sama dengan mereka ke arah perubahan yang direncanakan. Pembinaan relasi akan membantu memperoleh data mengenai kebutuhan dan sumber daya komunitas sasaran dan membentuk kepercayaan warga (local worker) yang ikut aktif melakukan perubahan dalam masyarakat.
- c. Tahap Klarifikasi atau Diagnosis Masalah Sistem Masyarakat. Pada saat data telah terkumpul, masalah yang semula tampak sederhana, kemungkinan bertambah rumit, karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok-kelompok yang menolak perubahan, masalah-masalah ketergantungan terhadap lembaga, dan sebagainya. Pada tahap ini, community worker harus mengklarifikasi dan menganalisis hakikat permasalahan sistem masyarakat.
- d. Tahap Pengkajian Alternatif Jalur dan Tujuan Perubahan, serta Penentuan Tujuan Program dan Kehendak untuk Melakukan Tindakan. Dari data yang telah dianalisis, kemudian ditentukan tujuan operasional dari program ataupun kegiatan yang akan dilakukan, serta alternatif cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa alternatif tersebut, kemudian diputuskan alternatif mana yang akan diterapkan serta program/kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
- e. Tahap Transformasi Kehendak ke dalam Upaya Perubahan yang Nyata. Tahap ini merupakan tahapan yang memfokuskan pada upaya mentransfer perencanaan program (program planning) menjadi pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata (action program). Pelaku perubahan dan komunitas sasaran harus melakukan pemantauan secara progresif, guna mempertahankan atau mencapai kinerja yang mereka inginkan.
- f. Tahap Generalisasi dan Stabilisasi Perubahan. Perubahan sebagai akibat dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program sebagaimana ditetapkan di atas akan stabil kalau dampak perubahan itu akan diikuti kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, atau meluas pada desa/kelurahan lainnya.

- g. Tahap Terminasi merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat sudah siap untuk 'mandiri' (mempunyai keterampilan teknis) untuk dapat terus mengembangkan kegiatan yang ada.

2.6 Kajian Kebencanaan

Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sedangkan menurut *The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* atau IFRC, bencana adalah peristiwa yang secara tiba-tiba sangat mengganggu fungsi komunitas atau masyarakat dan menyebabkan kerugian manusia, material, dan ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Meski sering kali disebabkan oleh alam, bencana bisa berasal dari manusia. Bencana terjadi ketika bahaya berdampak pada orang-orang yang rentan.

Sedangkan menurut WHO (2002) bencana adalah kejadian yang mengganggu kondisi normal keberadaan dan menyebabkan tingkat penderitaan itu melebihi kapasitas penyesuaian komunitas yang terkena dampak. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang berlangsung mendadak yang mampu mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana dapat menyebabkan efek negatif pada ekonomi, lingkungan, material, dan psikologis korban yang mengalaminya. Bencana memiliki sumber atau penyebab, berdasarkan sumber atau penyebabnya, United Nations Development Programme (UNDP) mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

- a. Bencana alam (natural disaster) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
- b. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.

- c. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

Faktor terjadinya bencana adalah adanya gabungan dari vulnerability dan hazard namun kapasitas masyarakat kurang untuk mempersiapkan bencana. Vulnerability adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan (susceptibility) sebuah komunitas terhadap dampak bahaya (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

2.7 Manajemen Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Sedangkan Subdiyakto (2011) mengartikan manajemen bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Tujuan dari manajemen bencana adalah untuk mengurangi kerugian dan risiko yang mungkin terjadi ketika bencana dan mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Subdiyakto (2011) juga menambahkan bahwa manajemen bencana terdiri dari dua tahap yaitu ex-ante (pra bencana) dan ex-past (pasca). Ex-ante terdiri dari kegiatan mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Ex-past terdiri dari kegiatan setelah bencana terjadi seperti rehabilitasi, dan rekonstruksi

Adapun tahap-tahap manajemen bencana adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko bencana

Manajemen risiko bencana di dalamnya terdapat mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan. Manajemen risiko bencana biasanya dilakukan sebelum bencana terjadi.

1) Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

2) Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui penyadaran adanya bencana, peningkatan kemampuan menghadapi bencana, dan pembangunan fisik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis kegiatan mitigasi bencana adalah penataan ruang, pengaturan pembangunan, tata bangunan, pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh aktivitas kesiapsiagaan bencana adalah uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, penyiapan lokasi evaluasi, dan penyusunan data informasi mengenai tanggap darurat bencana. Tujuan kesiapsiagaan adalah mengurangi ancaman, mengurangi dampak bencana, dan menjalin kerja sama (IDEP, 2007).

4) Manajemen kedaruratan

Manajemen kedaruratan dilakukan saat bencana terjadi dan kegiatan dari manajemen kedaruratan adalah tanggap darurat. Tanggap darurat menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

5) Manajemen pemulihan

Manajemen pemulihan dilakukan saat bencana telah usai dan di dalamnya terdapat pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi berbagai sektor.

(1) Pemulihan

UU No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (UU No. 24 Tahun 2007).

(3) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (UU No. 24 Tahun 2007).

Manajemen bencana penting bagi masyarakat untuk mengurangi ancaman-ancaman dan risiko bencana yang berujung pada berkurangnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Manajemen risiko juga penting setelah bencana alam agar upaya pemulihan, rehabilitasi, dan konstruksi dapat dilakukan secepatnya. Manajemen bencana dibangun melalui kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah mengenai permasalahan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana.

2.8 Kebijakan Terkait Bencana

Kebijakan yang terkait dengan bencana adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- b. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- e. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- f. Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- g. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
- h. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- i. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2.9 Kelompok Rentan

Menurut Olivier Serrat kerentanan merupakan perasaan tidak aman di kehidupan individu, keluarga dan komunitas ketika menghadapi perubahan di luar lingkungannya. Kerentanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya. Kerentanan biasa dirasakan oleh individu atau kelompok yang tinggal wilayah tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan aset yang dimilikinya. Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu.

Kerentanan dapat digambarkan sebagai situasi perubahan yang membingkai kehidupan manusia baik individu, keluarga maupun masyarakat. Konteks kerentanan merujuk pada situasi yang rentan yang dapat mempengaruhi atau dapat membuat suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dari adanya kerentanan biasanya dapat merugikan kehidupan baik individu maupun masyarakat walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa situasi rentan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan situasi yang dapat mempengaruhi atau menciptakan suatu perubahan di kehidupan individu, kelompok, ataupun masyarakat. Suatu perubahan yang diciptakan oleh adanya kerentanan dapat dikatakan sebagai ancaman bagi

mereka yang merasakan dampak positif maupun dampak negatif. Karena adanya kondisi yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak yang merasa dirinya kuat, kebanyakan kerentanan berpengaruh negatif bagi individu, keluarga maupun masyarakat di wilayah tertentu. Menurut Olivier Serrat terdapat tiga jenis kerentanan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejutan/kaget/guncangan (shock) yang dapat meliputi konflik, penyakit, banjir, badai, kekeringan, hama pada tumbuhan.
- b. Perubahan musiman (seasonalities) meliputi penetapan harga dan kesempatan bekerja.
- c. Kecenderungan (critical trends) yaitu kepadudukan, lingkungan, ekonomi, pemerintah, dan kecenderungan teknologi.

Jenis kerentanan di atas adalah kerentanan yang biasa timbul di masyarakat yang memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Perubahan tersebut biasanya terjadi secara tiba-tiba yang membuat tidak aman dan nyaman yang dapat meningkatkan perasaan bahaya atau wacana masyarakat. Dengan adanya kerentanan yang mengganggu aktivitas keseharian masyarakat hal tersebut harus ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat.

Definisi kelompok rentan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak dirumuskan secara eksplisit, seperti yang tercantum pada Pasal 5 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah prang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Sedangkan definisi kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Dapat disimpulkan bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

2.10 Pendidikan Mitigasi Bencana

Pendidikan mitigasi bencana adalah bentuk perubahan perilaku untuk meningkatkan tindakan perlindungan dengan menyajikan informasi tentang bahaya dan risiko yang ditimbulkannya. Definisi pendidikan mitigasi bencana lainnya adalah metode atau pendekatan dengan pemahaman konsep-konsep

yang berkaitan dengan kebencanaan yang bertujuan untuk mengembangkan pengertian dan kesadaran yang diperlukan untuk melakukan adaptasi kehidupan di daerah rawan bencana (Pendidikan Kebencanaan).

Mitigasi bencana adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari kedua dalam suatu negara atau masyarakat (Permendagri No. 33 Tahun 2006).

Pendidikan kebencanaan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak bencana, baik untuk anak-anak maupun masyarakat serta membiasakan diri untuk tanggap dan sigap terhadap penanggulangan bencana. Bentuk pendidikan mitigasi bencana bermacam-macam, ada yang berbasis masyarakat, pendidikan bencana untuk menuju masyarakat sadar bencana, serta kearifan lokal dalam menangani bencana. (Preston, 2012; Setyowati, 2007).

Sasaran pendidikan kebencanaan menurut Resolution Belgrad International Conference on Environmental Education adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran

Kesadaran bertujuan untuk membantu individu atau pun kelompok untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan keseluruhan berikut permasalahan yang terkait.

b. Pengetahuan

Pengetahuan membantu individu atau kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap lingkungan total, permasalahan yang terkait dan nyata, manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab yang penting di dalamnya.

c. Sikap

Sikap membantu individu atau kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial, rasa kepedulian, yang kuat terhadap lingkungannya, serta motivasi untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengembangan lingkungan.

d. Keterampilan

Keterampilan membantu individu atau kelompok sosial mengevaluasi persyaratan-persyaratan lingkungan dengan program pendidikan dari segi ekologi, politik, ekonomi, sosial, estetika, dan pendidikan.

e. Peran

Peran membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, dan urgensi terhadap suatu permasalahan lingkungan sehingga dapat mengambil tindakan relevan untuk pemecahannya.

BAB III

DESKRIPSI DESA MALANGBONG

3.1 Latar Belakang Desa Malangbong

3.1.1 Kondisi Geografis

Desa Malangbong merupakan salah satu desa di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa Malangbong memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Kecamatan Malangbong, dengan jarak 0.9 km dari kantor kecamatan Malangbong dan sekitar 42 km dari ibu kota Kabupaten Garut. Sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sejauh 69 Km. Secara umum Desa Malangbong merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Desa Malangbong memiliki ciri khas geografis sebagai desa dengan luas pesawahan terbesar, sebesar 133 Ha. Karakteristik wilayah desa ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelah selatan perkotaan dan sebelah utara pedesaan. Sedangkan luas wilayah administratif Desa Malangbong dibatasi dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Cisitu Kec. Malangbong
2. Sebelah Selatan : Desa Sukamanah Kec. Malangbong
3. Sebelah Timur: Kehutanan Kec. Malangbong
4. Sebelah Barat : Desa Cibunar / Desa Haurkuning Kec. Malangbong

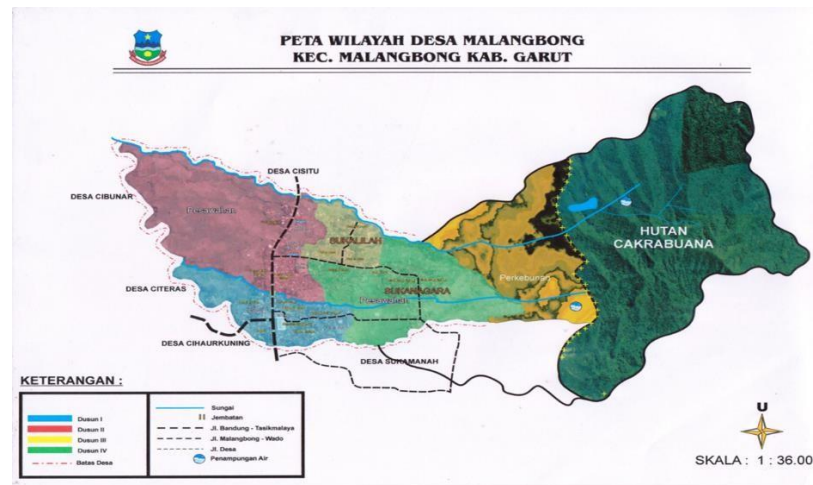
Desa Malangbong memiliki luas 447 Ha yang terbagi menjadi daerah pesawahan, ladang, perkebunan, hutan, pemukiman, dan lain-lain. Selain itu, desa Malangbong sebagai desa yang dilalui oleh lintas provinsi memiliki jumlah jalan sebanyak 6 Km yang terbagi menjadi jalan negara, jalan Provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Pembagian luas wilayah dan jalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Kondisi Geografis Desa Malangbong

Luas Daerah	:	477	Ha	Jalan	:		
1. Pesawahan	:	133	Ha	1. Jalan Negara	:	0.8	Km
2. Ladang	:	101	Ha	2. Jalan Provinsi	:	1.5	Km
3. Perkebunan	:	9	Ha	3. Jalan Kabupaten	:	2.5	Km
4. Hutan	:	84	Ha	4. Jalan Desa	:	1.2	Km

5. Pemukiman	:	111	Ha	5. Jalan Kereta Api	:	0	Km
6. Lain – lain	:	9	Ha				

Sedangkan peta wilayah desa malangbong secara citra dapat dilihat dalam gambar peta dibawah ini:



Gambar 3. 1 Peta Wilayah Desa Malangbong

Jumlah penduduk Desa Malangbong tahun 2023 adalah 7.823 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.943 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.880. Jumlah total kepala keluarga 2.418 KK dengan kepadatan penduduk 1.897.36/km.

Tabel 3. 2 Demografi Desa Malangbong

DEMOGRAFI			
a. Jumlah Penduduk	:	7843	Jiwa
b. Laki – Laki	:	3946	Jiwa
c. Perempuan	:	3897	Jiwa
d. Usia 0 – 15	:	2368	Jiwa
e. Usia 15 – 65	:	4636	Jiwa
f. Usia 65 keatas	:	819	Jiwa
g. Jumlah Dusun	:	4	
h. Jumlah Rukun Warga	:	8	
i. Jumlah Rukun Tetangga	:	34	

Sedangkan jumlah penduduk Desa Malangbong berdasarkan mata pencaharian didominasi oleh buruh tani sebesar 545 orang, pedagang 375 orang, petani sebanyak 170 orang. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Mata Pencaharian Desa Malangbong

No.	Kategori Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	59 orang
2.	TNI / Polri	23 orang
3.	Swasta	47 orang
4.	Wiraswasta	375 orang
5.	Petani	170 orang
6.	Buruh Tani	545 orang
7.	Tukang	52 orang
8.	Pensiunan	58 orang
9.	Peternak	14 orang
10.	Tidak Bekerja / pengangguran	567 orang
11.	Lainnya	144 orang

Desa Malangbong juga memiliki penduduk yang dapat dikatakan mau menerima perubahan dan terbuka atas inovasi dan sumber pengetahuan lainnya. jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Desa Malangbong

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah
Lulusan Pendidikan umum		
1.	Taman Kanak-kanak	96 Orang
2.	Sekolah Dasar/ sederajat	1.013 Orang
3.	SMP	827 Orang
4.	SMA/SMU	913 Orang
5.	Akademi/D1-D3	31 Orang
6.	Ssarjana	73 Orang
7.	Pascasarjana	12 Orang
Lulusan Pendidikan Khusus		
1.	Pondok Pesantren	15 Orang
2.	Pendidikan Keagamaan	16 Orang
3.	Sekolah Luar Biasa	0 Orang
4.	Kursus Keterampilan	0 Orang
Tidak lulus dan tidak sekolah		
1.	Tidak lulus	0 Orang
2.	Tidak bersekolah	0 Orang

3.1.2 Hidrologi Dan Klimatologi

Sumber daya air yang mengalir di Desa Malangbong dan menjadi sumber mata air yang digunakan masyarakat adalah sungai dan mata air. sedangkan sumber air berih didapatkan melalui mata air, sumur gali, pipa, sungai, dan depot isi ulang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Sumber Air Bersih Desa Malangbong

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
Mata Air	11	73	Rusak
Sumur gali	897	1067	Baik
Pipa	0,00	0.,00	Tidak
Sungai	2	899	Rusak
Depot isi ulang	5	324	Baik

Sumber daya air sungai yang mengalir dan digunakan oleh masyarakat memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Sumber Air Sungai Desa Malangbong

Jumlah sungai	2 buah
Kondisi	
Tercemar	Ya
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	Ya
Keruh	Tidak
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air	Tidak
Berkurangnya biota sungai	Ya
Kering	Ya

3.1.3 Keadaan Alam Dan Lahan Di Desa Malangbong

Keadaan alam dan lahan menjadi potensi besar bagi suatu desa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalamnya. Keadaan alam dan lahan Desa Malangbong dapat dikategorikan berdasarkan penggunaannya, iklim, kesuburan tanah, pertanian, dan kehutanan. kategori tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas wilayah menurut penggunaan	
Luas tanah sawah	133 Ha
Luas tanah kering	214 Ha
Luas tanah basah	0.00 Ha
Luas tanah perkebunan	9 Ha
Luas fasilitas umum	7 Ha
Luas tanah hutan	84 Ha
Total luas	447 Ha

Iklim adalah karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah dalam kurun waktu rata-rata berdurasi 30 tahun. Iklim Desa Malangbong diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Iklim Desa Malangbong

Iklim	
Curah hujan	2,589 mm
Jumlah bulan hujan	9 bulan
Kelembapan	60-76 %
Suhu rata-rata harian	24-27 C
Tinggi tempat dari permukaan laut	600-700 dpl

Berkembangnya sistem pertanian, perkebunan, dan struktur perumahan masyarakat bergantung pada jenis dan kesuburan tanah di suatu wilayah. Desa Malangbong memiliki jenis dan kesuburan tanah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Jenis dan Kesuburan Tanah

Jenis dan Kesuburan Tanah	
Warna tanah (sebagian besar)	Merah
Tekstur tanah	Sedang
Tingkat kemiringan tanah	178,8 Ha
Lahan kritis	16 Ha
Lahan terlantar	6,5 Ha
Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	65 Ha
Luas tanah erosi sedang	0.00 Ha
Luas tanah erosi berat	0.00 Ha
Luas tanah yang tidak ada erosi	382 Ha

Karakteristik masyarakat Malangbong sebagian besar merupakan buruh tani dan petani sehingga terdapat potensi sumber daya alam lahan pertanian yang melimpah. Padi menjadi salah satu sektor utama yang dihasilkan oleh pertanian di Desa Malangbong. kepemilikan lahan pertanian dan tanaman pangan dikelola oleh berbagai pihak, secara khusus di Desa Malangbong lahan pertanian biasanya dikelola oleh keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Malangbong

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	411 keluarga
Tidak memiliki	263 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	24 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	0 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 100 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga petani	698 keluarga

Melimpahnya lahan pertanian tanaman pangan dimanfaatkan oleh para petani dan buruh tani untuk menanam berbagai komoditas. Komoditas yang ditanam di Desa Malangbong terdiri dari padi, ubi jalar, kacang tanah, dan cabe keriting. sedangkan beberapa lainnya menanam sayuran dan buah.

Tabel 3. 11 Komoditas Desa Malangbong

Luas tanaman pangan menurut komoditas		
Padi sawah	133 Ha	6.01 Ton / Ha
Ubi Jalar	4 Ha	11 Ton / Ha
Kacang Tanah	2 Ha	1,5 Ton / Ha
Cabe Keriting	0,42 Ha	5 Ton / Ha

Selain melimpahnya sektor pertanian, Desa Malangbong juga memiliki hutan yang masih terjaga dan dikelola dengan baik oleh masing-masing pemilik lahan. Hutan yang ada di Desa Malangbong digunakan sebaik-baiknya sebagai

bahan baku untuk memasak berupa kayu bakar, usaha meubel, usaha anyaman, dan digunakan sebagai kekayaan alam.

Tabel 3. 12 Lahan Hutan Desa Malangbong

Luas Lahan Hutan Menurut Pemilikan	
Milik Negara	84.00 Ha
Milik Adat/Ulayat	0,00 Ha
Perhutani/Instansi Sektoral	0,00 Ha
Milik masyarakat perorangan	101.00 Ha
Total	185 Ha

Hutan yang dimiliki oleh Desa Malangbong memiliki komoditas atau hasil hutan berupa kayu dan bambu. Lahan hutan yang menghasilkan kayu dapat memperoleh sebanyak 1818.00 M³/ tahun. sedangkan lahan hutan yang menghasilkan bambu dalam satu tahun dapat menghasilkan 567.00 M³/Tahun.

3.2 Keadaan Khusus Dalam Masyarakat

3.2.1 Keadaan Sosial

A. Kesehatan

Desa Malangbong memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dengan pusat medis berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malangbong. Masyarakat dapat memanfaatkan sarana prasarana kesehatan yang ada dimasyarakat seperti Puskesmas dan Posyandu. Fasilitas prasarana Kesehatan Desa Malangbong dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 13 Prasarana Kesehatan Desa Malangbong

Prasarana Kesehatan	Keterangan
Puskesmas	Ada
Posyandu	Ada
Toko obat	Ada
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	Ada
Rumah Bersalin	Tidak Ada
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	Tidak Ada

Sedangkan sarana kesehatan Desa Malangbong terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dokter praktek dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Sarana Kesehatan Malangbong

Sarana Kesehatan	Keterangan
Jumlah dokter umum	5 Orang
Jumlah paramedis	0 Orang
Bidan	2 Orang
Perawat	3 Orang
Jumlah dokter praktek	4 Orang

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara membangun sumber daya manusia yang paling mendasar sehingga dirasa penting untuk ditingkatkan secara terus menerus. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat malangbong merupakan tamatan SMP. Data tingkat pendidikan Desa Malangbong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 15 Tingkat Pendidikan Desa Malangbong

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	239 Orang	217 Orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	48 Orang	45 Orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	984 Orang	978 Orang
Tamat SD/ sederajat	567 Orang	543 Orang
Tamat SMP/ sederajat	767 Orang	743 Orang
Tamat SMA/ sederajat	671 Orang	687 Orang
Tamat D-3/ sederajat	21 Orang	25 Orang
Tamat S-1/ sederajat	47 Orang	73 Orang
Tamat S-2/ sederajat	5 Orang	7 Orang
Jumlah Total	3943	3880

Berdasarkan data diatas, maka dapat terlihat bahwa sebagian besar mesyarakat merupakan lulusan SMP. Beberapa masyarakat desa Malangbong juga mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Sarana Pendidikan di Desa Malangbong dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 16 Sarana Pendidikan di Desa Malangbong

No	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Siswa		Kepala Sekolah / Madrasah
			L	P	
1.	SDN Malangbong I	Kp.Cigolengang RT 06 RW 02	219	195	Asep Zaeni Dahlan
2.	SDN Malangbong II	Kp.Bojong Badak RT 01 RW 02	148	143	Ikin Sadikin
3.	SDN Malngbong III	Kp.Pasar Kolot RT 04 RW 03	83	88	Asep Septiana Gani
4.	SDN Malangbong IV	Kp.Pasar Kolot RT 04 RW 03	26	20	Asep Septiana Gani
5.	SDN Malangbong V	Kp.Muncang Agung RT 04 RW 08	66	64	Anas Munawar
6.	MI Annur 2	Kp.Bebedahan RT 03 RW 07	99	107	Lilis Saadah
7.	SMP Al-Ilyas	Kp.Panyingkiran RT 03 RW 02	236	245	Rd.Wiwing TaRWin
8.	SMP Maarif	Kp.Bebedahan RT 04 RW 07	176	164	Nindin
9.	SMP Annur	Kp.Cidungus RT 04 RW 04	45	52	Jajang Abdul Rohman

No	Nama Sekolah	Alamat	Jumlah Siswa		Kepala Sekolah / Madrasah
			L	P	
10.	SMK Al Ilyas	Kp.Panyingkiran RT 03 RW 02	274	284	Deden Munawar
11.	SMA NEGRI 9 Malangbong	Kp.Bojong Saritangsi RT 04 RW 02	435	467	Wawan Gunawan Msi.
12.	SMA Aliyah Maarif	Kp.Bebedahan RT 04 RW 07	175	189	H.Dase
13.	TK.Bina Sarana Insani	Kp.Bebedahan RT 04 RW 07			
14.	TK Fahul Muawanah	Kp.Pasar Kolot RT 01 RW 03			Nonon
15.	TK Al-Ilyas	Kp.Panyingkiran RT 03 RW 02	20	30	Robiah M.Ag
16.	TK.PeRTiwi	Kp.Bojong Badak RT 01 RW 02			
17.	TK.Aba (Muhamadiyah)	Kp.Cigolengang RT 06 RW 02			

3.2.2 Sarana Dan Prasarana

A. Akses Listrik

Masyarakat Desa malangbong sebagian besar telah menggunakan akses listrik PLN. sebagian masyarakat lainnya menggunakan kayu bakar sebagai akses utama dalam memperoleh penerangan. Akses masyarakat terhadap listrik diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 17 Akses Listrik Desa Malangbong

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Listrik PLN	1 unit
2.	Diesel umum	0 unit
3.	Genset pribadi	4 unit
4.	Lampu minyak tanah/jarak/kelapa	0 Keluarga
5.	Kayu bakar	436 Keluarga
6.	Batu bara	0 Keluarga
7.	Tanpa penerangan	0 Keluarga

B. Akses Informasi

Masyarakat dapat memperoleh informasi baik secara daring ataupun luring. secara daring, masyarakat dapat memperoleh informasi melalui handphone karena hampir semua provider dapat digunakan. sedangkan informasi secara luring dapat diperoleh melalui rembug warga, kader, dan musyawarah tingkat RT, RW, ataupun Desa.

C. Sarana Olahraga

Tabel 3. 18 Sarana Olahraga Desa Malangbong

Sarana dan Prasarana Olahraga	Keterangan
Lapangan sepak bola	Ada
Lapangan bulu tangkis	Ada
Meja pingpong	Ada
Lapangan tenis	Ada
Lapangan voli	Ada
Arum jeram	Tidak ada
Lapangan basket	Tidak ada
Gelanggang Remaja	Tidak ada

D. Tempat Peribadatan

Masyarakat Desa Malangbong mayoritas beragama Islam sehingga melakukan peribadatan di masjid dan mushola. Desa Malangbong memiliki 5 unit masjid dan 34 unit mushola. Daftar tempat peribadatan di Desa Malangbong diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Tempat Peribadatan Desa Malangbong

No	Nama Mesjid	Alamat	Keterangan
1.	Attarbiyah	Kp.Kebon Kalapa Rt 01 Rw 01	Mushola
2.	Baiturahman	Kp.Kebon Kalapa Rt 02 Rw 01	Mushola
3.	Baitull Makmur	Kp.Kebon Kalapa Rt 05 Rw 01	Mushola
4.	Al-Ikhlas	Kp.Tanjaknangsi Rt 02 Rw 06	Maasjid Jami
5.	Al-Purqon	Kp.Tanjaknangsi Rt 01 Rw 06	Mushola
6.	Al-Ikhsan	Kp.Tanjaknangsi Rt 02 Rw 06	Mushola
7.	Masjid Al-Ilyas	Blok Kaum	Masjid Besar
8.	Al-Ikhlas	Kp.Bojong Saritangsi Rt 04 Rw 02	Mushola
9.	Mujahidin	Cigolendang Rt 06 Rw 02	Mushola
10.	Al-Huda	Kp.Panyingkiran Rt 02 Rw 02	Masjid Jami
11.	Al-Barkah	Kp.Panyingkiran Rt 02 Rw 02	Mushola
12.	Al-Hidayah	Kp.Pasarkolot Rt 03 Rw 03	Masjid Jami
13.	Al-Hikmah	Kp.Pasarkolot Rt 04 Rw 03	Mushola
14.	Miftahul Salam	Kp.Pasarkolot Rt 02 Rw 03	Mushola
15.	At-Atqwa	Kp.Pasarkolot Rt 05 Rw 03	Mushola
16.	Fathul Muawanah	Kp.Pasarkolot Rt 01 Rw 03	Masjid Jami
17.	At-Taubah	Kp.Bebedahan Rt 02 Rw 07	Masjid Jami
18.	Al-Ihklas	Kp.Bebedahan Rt 01 Rw 07	Mushola
19.	Al-Mubarak	Kp.Bebedahan Rt 04 Rw 07	Masjid Jami
20.	Al-Jaruki	Kp.Bebedahan Rt 02 Rw 05	Mushola
21.	Al-Ikhlas	Kp.Bebedahan Rt 03 Rw 05	Mushola
22.	Legok Haur	Kp.Bebedahan Rt 01 Rw 05	Mushola
23.	Raudhatul Muslimin	Kp.Pasarkolot Rt 03 Rw 04	Masjid Jami
24.	Al-Ihklas	Kp.Pasarkolot Rt 02 Rw 04	Mushola
25.	Al-Junaedi	Kp.Cidungus Rt 04 Rw 04	Mushola
26.	Al-Ikhsan	Kp.Cidungus Rt 04 Rw 04	Mushola
27.	Al-Hikmah	Kp.Muncang Agung Rt 02 Rw 08	Masjid Jami
28.	Arrohman	Kp.Muncang Agung Rt 05 Rw 08	Mushola
29.	Al-Huda	Kp.Muncang Agung Rt 04 Rw 08	Masjid Jami

30.	Kiara Payung	Kp.Muncang Agung Rt 03 Rw 08	Mushola
31.	Azzakiyah	Kp.Muncang Agung Rt 05 Rw 08	Mushola
32.	Ajjubaedi	Kp.Muncang Agung Rt 01 Rw 08	Mushola
33.	Nurhasanah	Kp.Muncang Agung Rt 05 Rw 08	Mushola
34.	Al-Muksin	Kp.Muncang Agung Rt 05 Rw 08	Mushola

3.2.3 Air Limbah

Limbah yang terbuang dan tidak dapat diolah di Desa Malangbong didominasi dengan pencemaran air, udara, dan tanah. Kebiasaan masyarakat mengenai sanitasi masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan. masyarakat juga masih sering membuang sampah di sungai dan mencemari biota sungai. Hal-hal tersebut yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan. Sanitasi di Desa Malangbong dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Sanitasi Desa Malangbong

Sanitasi	
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	0 unit
Sumur resapan air rumah tangga	0 rumah
Jumlah MCK Umum	8 unit
Pemilik jumlah jamban keluarga	1879 KK
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Rusak

3.2.4 Struktur Kepemimpinan

Susunan pemerintahan desa Malangbong berdasarkan buku Buku Monografi Desa Malangbong Tahun 2022 tentang susunan kepemimpinan pemerintahan desa Malangbong, struktur kepemimpinan disusun sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Struktur Pemerintahan Desa Malangbong

NO	JABATAN	NAMA	UMUR
1	Kepala Desa	ADANG	61 Tahun
2	Sekretaris	Enjang Syarif AF.Ssy	37 Tahun
3	Kaur Keuangan	Armila Sofi.S	30 Tahun
4	Kaur Perencanaan	Arif Rahman	34 Tahun
5	Kaur Tu Dan Umum	Dedi Kusnadi	51 Tahun
6	Kasi Pemerintahan	Ujang Solihin	51Tahun
7	Kasi Kesra	Dedi	48 Tahun
8	Kasi Pelayanan	Amin Nurdin	44 Tahun
9	Kadus I	Tatang Hilaludin	46 Tahun
10	Kadus II	Suhendar	55 Tahun
11	Kadus III	Roro Rohendi	55 Tahun
12	Kadus IV	A.Najmudin	44 Tahun
13	Ketua BPD	Engkos Dadang	65 Tahun
14	Ketua LPM	Supriatna	53 Tahun
15	Ketua MUI	KH.Ahmad Satibi	41 Tahun
16	Ketua RW I	Asep Jukri	53 Tahun
17	Ketua RW II	Asep Kiki Awaludin	41 Tahun
18	Ketua RW III	Wahyu Hadiman	57 Tahun

19	Ketua RW IV	Mochamad Rizky Riswandi	37 Tahun
20	Ketua RW V	Asep saepudin	50 Tahun
21	Ketua RW VI	Adang Sumarna	60 Tahun
22	Ketua RW VII	Asep subarna	74 Tahun
23	Ketua RW VIII	Jajang Hidayat	39 Tahun

Sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa, maka terdapat Kadus (Kepala Dusun) yang terdiri dari Kadus I, Kadus II, Kadus III, Kadus IV dengan rincian wewenang kekuasaan sebagai berikut:

1. Kadus I: RW 01 (5 RT) dan RW 02 (6 RT)
2. Kadus II: RW 03 (5 RT) dan RW 04 (4 RT)
3. Kadus III: RW 05 (3 RT) dan RW 06 (2 RT)
4. Kadus IV: RW 07 (4 RT) dan RW 08 (5 RT)

3.2.1 Struktur Ekonomi

Masyarakat Desa Malangbong memiliki struktur ekonomi yang dapat dilihat dari kategori lembaga ekonomi, jumlah kegiatan, dan jumlah pengurus. Lembaga ekonomi dirasa penting dalam menjaga iklim ekonomis masyarakat Malangbong. Lembaga ekonomi bergerak sesuai bidang usaha seperti lembaga unit desa, perdagangan, industri kecil, jasa gas, listrik, BBM, air, jasa keterampilan, dan jasa penyewaan yang dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 22 Struktur Ekonomi Desa Malangbong

LEMBAGA EKONOMI			
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0
Bumdes	1 Unit	3	3
Jumlah	1	3	3
2. Jasa Lembaga Keuangan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus
Lembaga Keuangan Non Bank	4 unit		
Bank Perkreditan Rakyat	2 unit		
Bank Pemerintah	3 unit		
Jumlah	9 unit		
3. Industri Kecil dan Menengah			
Industri makanan	10 unit		
Industri Material Bahan Bangunan	0 unit		
Industri Alat Pertanian	0 unit		
Rumah makan dan restoran	7 unit		
Jumlah	17 unit		

4. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Pasar Hasil Bumi/Tradisonal/Harian	0 unit		0 orang
Jumlah Usaha Toko/Kios	478 unit		478 orang
Toko Kelontong	347 unit		347 orang
Usaha Perikanan	2 unit		2 orang
Pengolahan Kayu (kusen)	1 unit		4 orang
5. Usaha Jasa Hiburan			
Rental alat musik	2 unit		4 Orang
Group Musik/Band	0 unit		0 orang
6. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air			
Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak	178 unit		178 orang
Usaha air minum kemasan/isi ulang	5 unit		5 orang
7. Usaha Jasa Keterampilan			
	Jumlah	Jumlah Jenis produk yang diperdagangkan	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Tukang Kayu	128 orang		128 orang
Tukang Batu	113 orang		113 orang
Tukang Jahit/Bordir	32 orang		32 orang
Tukang Cukur	9 orang		9 orang
Tukang Service Elektronik	3 orang		3 orang
Tukang Besi	3 orang		3 orang
8. Usaha Jasa Penginapan			
Persewaan Kamar	2 orang		2 orang
Kontrakan Rumah	13 orang		13 orang

3.2.5 Sistem Nilai Budaya

Karakteristik masyarakat Desa Malangbong terbagi menjadi 2 sesuai dengan letak geografisnya. masyarakat RW 1 dan 2 tinggal di daerah perkotaan dekat dengan alun-alun. Hal ini mempengaruhi sistem nilai budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat RW 1 dan 2 cenderung individualis sehingga nilai budaya gotong royong sudah tidak terlalu kuat di masyarakat.

Sedangkan masyarakat RW 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tinggal di daerah pedesaan sehingga masih memiliki karakteristik nilai budaya kegotongroyongan. Sebagai contoh, masyarakat pada RW-RW tersebut masih memiliki sistem kekeluargaan *jimpitan*, *kencleng*, *rewang*, *botram*, dan lain-lain.

Perbedaan kedua karakteristik tersebut melekat pada masyarakat desa Malangbong. Namun, kebudayaan sunda masih cukup kental dan terjaga.

3.2.6 Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial yang sering diakses oleh masyarakat didominasi oleh pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan NIK, KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Pelayanan lainnya yang diakses masyarakat terkait perizinan pembukaan lahan, membuka usaha, mengadakan acara, dan izin pendirian bangunan.

Pelayanan kesejahteraan sosial yang diakses secara khusus oleh masyarakat prasejahtera terkait dengan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT Dana Desa, Bantuan Pangan, Bantuan Stunting, BPJS PBI, dan bantuan dana Apirasi.

3.2.7 Kemungkinan Menerima Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi di dalam masyarakat. manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu baik ke arah positif ataupun negatif. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia baik secara biologis, sosial, ataupun lingkungan.

Masyarakat Desa Malangbong sebagai masyarakat yang dinamis dan terbuka memiliki kemungkinan yang besar dalam menerima perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rasa ingin tahu, besarnya motivasi setiap masyarakat, dan terbukanya akses terhadap pendidikan, internet, ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Masyarakat mau mengikuti setiap perubahan sehingga tidak tertinggal. Masyarakat seringkali merasa tidak puas atas hasil yang dicapai sebelum perubahan terjadi, serta adanya keinginan kolektif untuk memiliki keterampilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan diri masyarakat itu sendiri.

3.3 Kehidupan Interaksi Sosial Masyarakat

Kerjasama yang terjalin cukup kuat, terutama di beberapa RW yang memang masih bersifat guyub rukun seperti di RW 06 dan RW 08. Gotong royong dan Komunikasi yang terjalin di masyarakat terbilang baik. Hubungan antara anggota masyarakat terbilang erat

Jika terdapat suatu kegiatan, maka masyarakat bahu membahu membantu persiapan acara tersebut. Masyarakat pun tidak ragu untuk memberikan sumbangan atau iuran. Dikarenakan rumah antar warga cukup dekat

satu sama lain, maka tidak dapat dipungkiri terkait dengan adanya konflik. Namun konflik tersebut merupakan konflik kecil yang bisa diatasi serta tidak berjalan lama.

3.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber merupakan kesanggupan, daya, kekuatan dan lain sebagainya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Berikut merupakan klasifikasi sumber – sumber yang dapat didayagunakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial

A. Potensi dan Sumber Manusiawi

Potensi dan sumber manusiawi merupakan ketersediaan sumber daya manusia yang terdapat di yang terdiri dari 22 beragamnya jenis mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat dan masyarakat-masyarakat yang memiliki potensi serta memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun kesejahteraan masyarakat

B. Potensi dan Sumber Alamiah

Potensi dan sumber alamiah adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari – hari. Berikut potensi dan sumber alamiah yang terdapat di Desa Malangbong .

C. Potensi dan Sumber Material

Potensi dan sumber material merupakan sumber fisik berupa bangunan dan infrastruktur sebagai sarana prasarana fasilitas umum yang dimiliki dengan tujuan untuk menunjang kegiatan - kegiatan masyarakat. Fasilitas umum yang dimaksud bisa berupa sarana pendidikan, sarana keagamaan, sarana kesehatan dan sarana fasilitas umum.

D. Potensi dan Sumber Non Material

Potensi dan sumber non material merupakan sumber non fisik berupa kondisi kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat yang terdapat di suatu daerah dan masih dipegang teguh dalam pelaksanaan seRTa implementasinya

E. Potensi dan Sumber Finansial

Potensi dan sumber finansial merupakan sumber keuangan yang terdapat di masyarakat dan bisa digunakan serta dapat membantu masyarakat

Tabel 3. 23 Potensi dan Sumber Finansial Desa Malangbong

No	Sistem Sumber	Kesediaan Sumber
1.	Manusiawi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya warga yang tergabung dalam organisasi lokal seperti Karang Taruna, LPM, Pemuda, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan BUMDes 2) Adanya tokoh masyarakat yang dihormati seperti tokoh agama 1) Adanya pengrajin petani, buruh tani, pedagang, pengrajin, tukang atau ahli bengkel, PNS/ TNI/ Polri dan Karyawan BUMN/BUMD. 2) Adanya bidan desa
2.	Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya lahan perkebunan milik masyarakat 2) Tanah yang cukup subur sehingga memberi keuntungan pada petani dan rumput yang tumbuh menjadi pakan bagi para peternak sehingga tidak kekurangan pakan 3) Adanya mata air yang digunakan untuk kebutuhan air bersih atau irigasi yaitu
3.	Material	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya sarana olahraga seperti lapangan voli, lapangan badminton dan lapangan bola 2) Adanya masjid dan mushola/surau 3) Terdapat klinik dan apotek 4) Terdapat posyandu 5) Terdapat sarana pendidikan yaitu PAUD/TK, SD dan SMP
4.	Non Material	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingginya semangat gotong royong di beberapa RW 2) Adanya kebiasaan membantu warga melalui kegiatan beas perelek 3) Adanya perayaan keagamaan 4) Terdapat kesenian seperti qasidah
5.	Finansial	Tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan iuran di beberapa RW

3.5 Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi dan tradisi yang ditandai dengan proses sosial yang disosiatif. Disamping itu, apabila proses perkembangan berlangsung dengan cepat maka akan menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat dan menyebabkan kekagetan budaya (*cultural shock*) dan kesenjangan budaya (*cultural lag*).

Masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok masyarakat yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Desa Malangbong dengan banyaknya jumlah masyarakat, memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, dan dinamis rentan mengalami masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi di Desa Malangbong dapat diidentifikasi sesuai dengan kategori masalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Masalah Sosial Desa Malangbong

No	Masalah Sosial	Keterangan
1.	Anak Balita Terlantar	Tidak Ada
2.	Anak Terlantar	Tidak Ada
3.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Tidak Ada
4.	Anak Jalanan	3
5.	Anak Dengan Disabilitas	6
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	1
7.	Anak dengan Stunting	48
8.	Lanjut Usia Terlantar	Tidak Ada
9.	Penyandang Disabilitas	25
10.	Tuna Susila	Tidak Ada
11.	Pemulung	7
12.	Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP)	5
13.	HIV/AIDS	Tidak Ada
14.	Penyalahgunaan Napza	Tidak Ada
15.	Fakir Miskin	52 KK
16.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10
17.	Orang dengan virus TBC	31

Selain masalah-masalah diatas, Desa Malangbong mengalami berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan, lingkungan dan masalah kesehatan. Masalah-masalah tersebut dapat dipetakan sesuai dengan jumlah penderita. Masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin di Desa Malangbong sebanyak 716 jiwa, stunting 48 anak, virus TBC 31 orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) 176 jiwa. Selain itu, terdapat masalah sampah dengan gejala utama masyarakat masih membuang sampah di sungai Cikurutug sehingga seringkali menyebabkan pencemaran air. Desa Malangbong sebagai desa rawan bencana memiliki risiko kebencanaan yang sering terjadi. Bencana yang terjadi di desa ini terjadi pada tahun 2022 dengan bencana angin puting beliung, banjir bandang, dan kebakaran hutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum komunitas dilaksanakan selama 40 hari, mulai tanggal 28 Oktober sampai tanggal 9 Desember 2023. Kegiatan praktikum komunitas ini dilakukan dengan menggunakan sistem block placement di 14 desa berbeda di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Adapun praktikan melaksanakan kegiatan praktikum komunitas di Desa Malangbong.

Pelaksanaan praktikum komunitas terbagi ke dalam beberapa tahapan praktik. Dimulai dari tahapan inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, sampai dengan evaluasi, terminasi, dan rujukan. berikut adalah hasil pelaksanaan praktikum di Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.

4.1 Inisiasi Sosial

Inisiasi sosial adalah kegiatan yang mengawali praktikum komunitas dengan kegiatan memasuki, melakukan kontak pendahuluan, memahami karakteristik masyarakat, membangun relasi dengan masyarakat hingga terbangun kesiapan, dan kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan pengembangan masyarakat. Inisiasi sosial merespon isu penting berkenaan dengan kebutuhan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta pencegahan atau penanganan permasalahan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam inisiasi sosial, praktikan membangun relasi dengan pemerintah Desa Malangbong dan berbagai elemen masyarakat, utamanya dengan masyarakat Kampung Tanjak Nangsi. Teknik yang digunakan adalah home visit, percakapan sosial, dan studi dokumentasi. Praktikan meminta izin dan menjelaskan tujuan melaksanakan praktikum kepada aparat pemerintah desa, dalam hal ini adalah Sekretaris Desa dan Ketua RW 06 Kampung Tanjak Nangsi. Selain meminta izin, praktikan juga membangun koneksi dan relasi untuk mempermudah jalannya praktikum komunitas. Waktu untuk melakukan inisiasi sosial adalah 31 Oktober – 4 November 2023.

4.1.1 Proses Inisiasi Sosial

Berikut ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan praktikan pada tahap inisiasi sosial diantaranya yaitu :

a. Perizinan dan Penerimaan Awal

Perizinan praktikan di tempat praktikum dilakukan pihak dari Desa Malangbong pada tanggal 31 Oktober 2023, dimana praktikan berkoordinasi secara berkala terkait pelaksanaan praktikum. Praktikan memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan praktikum kepada pihak kelurahan, serta menyampaikan matriks rencana kegiatan praktikan selama melakukan praktikum komunitas di Desa Malangbong.

b. Kegiatan di Masyarakat (*Community Involvement*)

Community Involvement dilakukan dengan meleburkan diri atau melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat di Desa Malangbong. Kegiatan yang dilakukan ataupun yang diikuti oleh praktikan yaitu diantaranya :

- 1) Membantu Penyaluran Bantuan Beras untuk KPM yang dilaksanakan pada 7 November 2023 di Kantor Desa Malangbong bersama sama dengan para staff kantor desa.
- 2) Membantu Penyaluran Bantuan Pangan untuk Stunting yang dilaksanakan pada 9 November 2023 di Kantor Desa Malangbong bersama sama dengan staff Kantor Desa Malangbong yang bertujuan untuk memberikan dukungan kesehatan dan gizi pada anak.
- 3) Mengikuti Posyandu rutin di RW 06 dan RW 03 bersama dengan para kader posyandu dan bidan desa yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan ibu dan anak.
- 4) Penimbangan dan pengolahan sampah di Bank Sampah RW 03 bersama sama dengan direktur Bank Sampah Induk Malangbong (BSIM).
- 5) Penyiraman dan Penanaman bibit baru bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) di RW 08.

c. Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Kegiatan home visit dilakukan oleh praktikan dengan mengunjungi rumah Ketua RW 1, Ketua RW 2, Ketua RW 4, Ketua RW 7, Ketua RW 8, Ketua PKK Desa Malangbong, Pendamping PKH, Kelompok Wanita Tani, Ketua

BUMDes, dan tokoh masyarakat. Kegiatan home visit bertujuan untuk membangun silaturahmi serta menjalin kepercayaan masyarakat kepada praktikan selama melakukan praktikum. Kegiatan home visit dilakukan oleh praktikan dengan memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan praktikan dalam melakukan praktikum di wilayah Desa Malangbong. Dalam kegiatan home visit, praktikan sekaligus juga melakukan identifikasi kegiatan serta profil komunitas yang ada di wilayah Desa Malangbong.

d. *Transect Walk*

Transect Walk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh praktikan dengan jalan menelusuri wilayah Desa Malangbong. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal dan memahami kondisi geografis dan situasi lingkungan sosial di Desa Malangbong. Adapun proses dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

1) *Proses Transect Walk*

Praktikan melakukan teknik *transect walk* di mulai pada tanggal 5, 6, dan 7 November 2023 dengan berjalan mengelilingi RW 06 dimana posko Praktikan berada. Sepanjang perjalanan menyusuri RW 06 jalan di samping kanan dan kiri jalan dipenuhi rumah-rumah warga. Akses jalan belum beraspal dan banyak bebatuan walaupun tidak terlalu lebar. Selain di RW 06 praktikan juga mengelilingi RW 1, RW 3, RW 5, RW 7.

2) Pada saat transect walk praktikan menemukan banyak potensi dan sumber maupun permasalahan yang nampak dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tujuan dari transect walk berguna untuk membuat peta sosial Desa Malangbong. Praktikan menemukan banyak home industry yang bergerak dalam bidang kuliner. Selama transect walk praktikan melihat adanya permasalahan mengenai sampah, limbah peternakan, dan limbah pertanian. Hasil dari dilakukannya transect walk yaitu praktikan lebih memahami potensi dan sistem sumber yang ada di Desa Malangbong dan mengenal wilayah di Desa Malangbong.

4.1.2 Hasil Inisiasi Sosial

Dari kegiatan inisiasi sosial yang telah dilakukan oleh praktikan, didapatkan hasil yang diperoleh diantaranya :

a. Masyarakat Menerima Adanya Praktikan

Hasil dari inisiasi sosial yang diterima oleh praktikan yaitu masyarakat menerima keberadaan praktikan selama melaksanakan kegiatan praktikum komunitas di Desa Malangbong. Masyarakat serta Stakeholder sangat terbuka dengan kegiatan yang praktikan lakukan serta mengizinkan praktikan untuk terlibat dalam kegiatan yang mereka lakukan.

b. Tersampainya Maksud dan Tujuan

Tahap inisiasi sosial menjadi tahap pengenalan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan praktikan melakukan praktikum komunitas terhitung selama 40 hari. Penyampaian maksud dan tujuan telah tersampaikan kepada aparat serta masyarakat Kelurahan Malangbong diantaranya yaitu Lurah Kelurahan Malangbong, Ketua RW 1, Ketua RW 2, Ketua RW 3, Ketua RW 4, Ketua RW 5, Ketua RW 6, Ketua RW 7, Ketua RW 8, Ketua PKK Desa Malangbong, Pendamping PKH, Kelompok Wanita Tani, Ketua BUMDes, dan tokoh masyarakat, serta Karang Taruna.

c. Terbangunnya Relasi dengan Masyarakat

Inisiasi sosial yang dilakukan oleh praktikan juga berhasil membuat relasi yang baik dengan masyarakat. Adanya kepercayaan dari masyarakat serta aparat di Desa Malangbong dapat dilihat yaitu praktikan diundang dalam mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat serta diperbolehkannya praktikan menggunakan aula desa dalam melakukan kegiatan selama praktikum. Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda (karang taruna) juga memberikan dukungannya seperti mengajak praktikan ikut dalam kegiatan pengajian karang taruna serta praktikan juga diberikan masukan dan saran yang bermanfaat dalam melakukan kegiatan di Desa Malangbong.

4.2 Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial adalah proses mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi sosial lokal, pelibatan organisasi yang potensial untuk menggerakkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dalam upaya pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial, mencegah dan mengani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dalam melakukan pengorganisasian sosial, praktikan menyoar *target group* dan *interest group* untuk berdiskusi dan menentukan kesepakatan secara bersama-sama. Pelaksanaan pengorganisasian sosial dilakukan pada tanggal 31 Oktober – 4 November 2023.

4.2.1 Proses Pengorganisasian Sosial

a. Diskusi dengan Ketua PKK Desa Malangbong

Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023. Pengorganisasian sosial bersama PKK dilakukan karena dalam hal ini praktikan menggali informasi terkait PKK secara keseluruhan. Praktikan mendapat informasi terkait PKK langsung dari ketua PKK Ibu Dede Sukaesih. PKK dalam menjalankan kegiatannya terbagi menjadi empat kelompok kerja (POKJA).

b. Kunjungan ke Kelompok Wanita Tani Desa Malangbong

Pada kunjungan ini, praktikan menggali informasi mengenai Kelompok Wanita tani. Dalam kelompok ini terdiri dari 16 anggota. Kelompok wanita tani sudah sering mendapatkan pelatihan dari dinas-dinas terkait. Setiap bulan selalu ada pertemuan. Pertemuan kelompok wanita tani biasanya meliputi pelatihan pembuatan makanan menggunakan komoditas hasil pertanian yang melimpah di Desa Malangbong. Namun, semenjak covid-19 pertemuan rutin kelompok wanita tani sempat terhenti dan saat ini sudah mulai aktif kembali.

c. Diskusi dengan Karang Taruna Desa Malangbong

Diskusi ini dilaksanakan di aula Desa Malangbong. Praktikan menggali informasi lebih dalam mengenai karang taruna yang berada di Desa Malangbong. Informan mengungkapkan bahwasannya karang taruna saat ini hanya aktif jika ada acara-acara besar saja. Tidak semua karang taruna di 8 RW yang ada di Desa Malangbong aktif. Hal tersebut terjadi karena sekarang banyak anak muda lebih senang bermain gadget di rumah masing-masing. Beliau pun mengungkapkan bahwasannya karang taruna membutuhkan regenerasi, sebab beliau sendiri saat ini sudah menikah dan mempunyai anak sehingga seharusnya sudah tidak sebagai karang taruna lagi. Pada umumnya karang taruna identik dengan anak-anak muda.

d. Kunjungan ke UMKM Cilok MB Desa Malangbong

Kunjungan ini praktikan lakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai UMKM yang berada di Desa Malangbong. UMKM Cilok MB adalah milik ibu

Euis. Usaha ini telah dibangun oleh beliau sejak tahun 2014 dengan produk awal yaitu cilok tanpa rasa. Melihat produknya yang laku keras di pasaran, ibu Euis terus berinovasi menciptakan varian cilok menggunakan berbagai bahan baku. Salah satu inovasinya yaitu cilok ayam dan cilok sapi. Melihat pengusaha cilok di Desa Malangbong belum ada, ibu Euis melihat ini sebagai suatu peluang. Berkat inovasinya tersebut, Cilok MB mendapatkan banyak pelanggan sampai luar pulau Jawa.

e. Kunjungan ke Direktur Bank Sampah Induk Malangbong (BSIM)

Kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Bank Sampah yang bertempat di Bank Sampah RW 03, disini ada 5 pengurus Bank Sampah. Bank Sampah ini adalah pelopor pertama bank sampah di Desa Malangbong. Kegiatan yang dilakukan bank sampah adalah melakukan penimbangan rutin dari hasil sampah yang dihasilkan oleh warga RW 03, dimana selanjutnya sampah ini akan dibersihkan dan diolah menjadi suatu kerajinan yang bernilai ekonomis, salah satunya pembuatan baju dari sampah yang dibuat oleh 5 pengurus bank sampah yang selanjutnya akan di jual di aplikasi *Shopee*. Serta ada juga pembuatan *eco brick*.

4.2.2 Hasil Pengorganisasi Sosial

Setiap tahapan yang dilalui pada proses pengorganisasian sosial yang telah dijalani oleh Praktikan menghasilkan beberapa identifikasi. Hasil dari kegiatan pengorganisasian sosial yang telah dilakukan diantara lain yaitu:

- a. Menemukanali organisasi apa saja yang ada pada masyarakat.
- b. Mengetahui apa yang menjadi masalah yang disadari oleh masyarakat Desa Malangbong.
- c. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi untuk penanggulangan permasalahan yang ada di Desa Malangbong.
- d. Praktikan memanfaatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang mulai tumbuh terkait permasalahan sosial yang ada untuk menanggulangi permasalahan sosial tersebut .
- e. Menemukanali Sistem sumber yang ada di Desa Malangbong.

4.3 Asesmen

Asesmen adalah proses dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu pemahaman dan pengungkapan masalah melalui kegiatan pengumpulan data, penganalisan data dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh tentang permasalahan, kebutuhan dan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat. Asesmen meliputi:

- a. Masalah : Memahami secara konseptual dan definisikan masalah atau kebutuhan, memahami riwayat kemunculannya (sebab akibatnya), memahami data tentang masalah baik secara kuantitatif dan informasi lainnya.
- b. Populasi : memahami pihak-pihak yang terkena atau mengalami permasalahan, memahami karakteristiknya, dan memahami apa makna masalah bagi masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.
- c. Arena : memahami profil komunitas, membuat peta masyarakat (identifikasi potensi, sumber, kekuatan, pihak yang mendukung, pihak menentang (oposan), merumuskan batasan rencana perubahan yang akan dilakukan.

Pendekatan yang digunakan praktikan dalam kegiatan asesmen adalah Pengembangan Masyarakat Lokal (Locality Development). Rothman (1995) mengatakan bahwa locality development bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat dengan menitik beratkan pada tujuan proses (process goal) dengan prinsip partisipatif, sehingga masyarakat akan memiliki keterampilan dan kemampuan dalam memecahkan masalahnya sendiri (self help).

4.3.1 Asesmen Awal

Asesmen awal dilaksanakan untuk menggali permasalahan sosial dan potensi yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah sosial yang ada di Desa Malangbong. Asesmen juga dilakukan untuk menentukan prioritas masalah yang terdapat di Desa Malangbong.

4.3.1.1 Tujuan

Tujuan dari asesmen awal adalah untuk memperoleh gambaran secara umum terkait permasalahan atau isu-isu komunitas yang ada di Desa Malangbong serta mengidentifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk

membantu menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Malangbong.

4.3.1.2 Sasaran

Yang menjadi sasaran dari kegiatan asesmen ini yaitu aparat Desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua Organisasi yang ada di Desa Malangbong meliputi Karang Taruna, PKK, Kelompok Wanita Tani, UMKM, dan Kelompok Pemuda.

4.3.1.3 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan asesmen ini berlangsung dari tanggal 5 November hingga 11 November 2023.

4.3.1.4 Langkah-Langkah

a. *Community Meeting Forum* (Rembug Warga)

Kegiatan Rembug warga dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023 di Aula Kantor Desa Malangbong. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Ketua Organisasi sosial yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, Kader Posyandu, Kelompok Ternak, Kelompok Tani, kelompok UMKM, dan Pendamping PKH. Dalam kegiatan ini praktikan memperkenalkan diri kembali, serta menyampaikan tujuan dilaksakannya rembug warga dan menjelaskan kepada tamu undangan tentang proses praktikum komunitas. Dalam kegiatan ini, praktikan memaparkan pemahaman terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), setelah diberi pemahaman terkait PPKS dan PSKS warga yang hadir diharapkan dapat mengidentifikasi PPKS dan PSKS yang ada di Desa Malangbong. Selain itu, praktikan mengharapakan warga untuk menumbuhkan keinginan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan yang ada maupun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Malangbong. Kegiatan rembug warga ini kurang lebih berjalan selama dua setengah jam. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan selama *communtiy meeting* ialah:

- 1) Praktikan memberikan sambutan serta menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan rembug warga dan menyampaikan permohonan

untuk tamu undangan agar dapat berpartisipasi dengan aktif dalam acara rebug warga ini.

- 2) Selanjutnya melakukan sosialisasi tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 3) Mengidentifikasi Permasalahan sosial yang ada di Desa Malangbong baik itu PPKS dan PSKS maupun permasalahan sosial lainnya melalui teknik Methodology Participatory og Assesment (MPA) dengan menggunakan Metacard dan Diagram Venn (Asesmen Kelembagaan).

b. Mengidentifikasi Permasalahan, Potensi, dan Target Groups

Pada kegiatan ini praktikan menanyakan permasalahan yang ada langsung kepada masyarakat dalam pelaksanaan MPA. Dalam kegiatan ini masyarakat berperan aktif dalam memberikan pendapat mengenai permasalahan yang ada, penyebaran masalahnya, hingga sumber apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengidentifikasian permasalahan serta potensi yang dimiliki oleh Desa dilakukan dengan wawancara non formal yang dilakukan pada perangkat Desa, Kepala dusun dan Ketua RW.



Gambar 4. 1 Pelaksanaan MPA

c. Hasil Asesmen Awal

Asesmen awal dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali masalah secara umum, mengonfirmasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mengidentifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersedia, mengidentifikasi masalah-masalah yang harus dijadikan prioritas untuk diselesaikan lebih dulu.

Dalam menggali masalah pada asesmen awal, praktikan melaksanakan Methodology of Participatory Assesment (MPA). MPA adalah metodologi yang melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam proses evaluasi, pemantauan, dan penilaian kebutuhan mereka. Metodologi ini mendasarkan diri pada prinsip demokrasi partisipatif, memberikan hak berbicara kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan sumber daya yang mereka perlukan.

Kegiatan Methodology Participatory Assesment (MPA) dilaksanakan di Aula Kantor Desa Malangbong. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi yang ada di dalam maupun di luar masyarakat. Dalam kegiatan Methodology Participatory Assesment (MPA) praktikan berperan sebagai fasilitator. Praktikan terlebih dulu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada audiens yang hadir dalam pelaksanaan MPA. Kemudian, praktikan mulai menjelaskan terkait permasalahan apa saja yang termasuk dalam permasalahan sosial dan menekankan untuk tidak mencantumkan permasalahan pribadi. Selanjutnya, praktikan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk menuliskan permasalahan dan potensi yang ada di Desa Malangbong sesuai dengan PPKS dan PSKS yang telah dijelaskan. Setelah audiens menuliskan permasalahan di kertas yang telah dibagikan, selanjutnya praktikan mengelompokkan permasalahan dan potensi yang teridentifikasi sehingga ditemukan prioritas masalah yang penting atau didahulukan untuk dicari solusi permasalahan. Semua kegiatan ini dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat, mulai dari mengidentifikasikan permasalahan sosial dan sumber potensi hingga penentuan prioritas yang dilakukan dengan jumlah suara terbanyak.

Kegiatan MPA dihadiri oleh aparat dan perangkat desa, Kader PKK, Tokoh masyarakat, karang Taruna, Kepala Dusun, dan Ketua RW. Kegiatan MPA dilaksanakan dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat. Alat-alat yang digunakan dalam analisis tersebut ialah kertas plano, spidol, meta card, paper tape atau lem.

Hasil yang praktikan dapatkan dari tahap proses asesmen awal yang dilaksanakan melalui rembug warga dan pelaksanaan Methodology Participatory of Assesment (MPA) adalah teridentifikasinya masalah-masalah sosial. Berdasarkan kegiatan rembug warga, teridentifikasilah pemetaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Desa Malangbong. Selanjutnya,

PPKS jangkauan mahasiswa akan dibandingkan dengan data PPKS keseluruhan yang ada di Desa Malangbong. Pemetaan tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Jenis PPKS	Data Sebenarnya	Hasil Jangkauan Mahasiswa	DTKS	Persentase
Fakir Miskin	313	101	101	32%
Korban Bencana	79	13	13	16%
Pemulung	7	4	4	57%
PRSE (RW 06)	22	22	19	100%

Tabel 4. 1 Data Permasalahan Sosial di Desa Malangbong

No.	Permasalahan Sosial	Keterangan
	Kurangnya kesadaran tentang bahaya wilayah potensi rawan bencana	Masyarakat Desa Malangbong belum terdedukasi mengenai potensi bencana yang akan terjadi serta kesiapsiagaan bencana.
	Rendahnya kesadaran warga tentang pengelolaan sampah	Hampir terjadi di seluruh Desa Malangbong. Hal yang menjadi pusat perhatian yaitu tidak adanya lahan dan kurangnya perhatian pemerintah desa mengenai permasalahan sampah.
	Belum adanya pelatihan usaha ekonomi produktif bagi ibu-ibu	Sebagian besar ibu-ibu di Desa Malangbong adalah ibu rumah tangga. Hal ini menjadi perhatian karena kurangnya keterampilan dan tidak ada pemberdayaan yang bisa membantu dalam mengembangkan diri mereka.
	Belum maksimalnya penanganan penyebaran dan pengentasan TBC di Desa Malangbong	Menjadi masalah kesehatan utama di Desa Malangbong dengan rekor pengidap paling tinggi di Kecamatan Malangbong yaitu 31 orang, sehingga perlu disoroti oleh pihak pemerintah desa.
	Belum optimalnya program PMT dalam menangani stunting di Desa Malangbong.	Desa Malangbong memiliki total 56 kasus anak stunting, namun pemenuhan gizi seimbang dan pencegahan stunting belum menjadi perhatian masyarakat sehingga diperlukan kelompok peduli stunting yang akan menjadi agen perubahan.

Setelah semua isu komunitas sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi potensi-potensi yang terdapat di Desa Malangbong. Berdasarkan MPA yang sudah dilakukan oleh praktikan bersama masyarakat, diketahui adanya Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdapat di Desa Malangbong antara lain :

Tabel 4. 2 Potensi dan Sumber di Desa Malangbong

SDA	SDM	Kelembagaan
Lahan pertanian (padi, singkong, ubi)	Masyarakat terbuka untuk menerima perubahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Lahan perkebunan (cabai, tomat, rempah-rempah, sayur mayur).	Rata-rata masyarakat berpendidikan SLTA/SMA	Kelompok Wanita Tani (KWT)
Peternakan ikan, unggas, kambing/domba, dan sapi	Masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi.	Kampung Siaga Bencana (KSB)
Sungai	Budaya gotong royong masih kental di dalam masyarakat.	Karang Taruna Bank Sampah Kader TBC BUMDes

Setelah mengidentifikasi masalah dan potensi sumber yang tersedia di desa malangbong, selanjutnya praktikan melakukan penentuan prioritas masalah yang harus lebih dahulu diselesaikan. Prioritas masalah tersebut ialah:

1. Tingginya angka korban bencana alam
2. Tingginya angka anak stunting
3. Kemiskinan yang menimpa fakir miskin atau janda
4. Wabah TBC
5. belum ada pengolahan dan pengelolaan sampah pada tingkat RT/RW

Berdasarkan pemetaan prioritas masalah di atas, maka praktikan dapat melakukan asesmen lanjutan yang menysasar kepada sasaran masalah stunting untuk selanjutnya dilakukan asesmen lanjutan, penyusunan rencana intervensi, dan intervensi.

4.3.2 Asesmen Lanjutan

Asesmen lanjutan merupakan tahapan pekerjaan sosial yang harus dilakukan oleh praktikan dalam menganalisis permasalahan yang ditangani meliputi sebab, akibat, populasi penyebarannya, upaya yang sedang atau pernah dilakukan, hasil yang dicapai, faktor pendukung dan penghambat upaya

perubahan. Selain itu praktikan juga dituntut untuk mampu merumuskan perubahan yang diperlukan serta menganalisis sumber-sumber yang relevan yang digunakan untuk melakukan upaya perubahan. Pada tahap ini, praktikan berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai kurangnya kesadaran tentang wilayah potensi rawan bencana di Desa Malangbong. Akan tetapi karena keterbatasan waktu maka praktikan memilih untuk fokus di wilayah RW 6 Kampung Tanjak Nangsi. Berikut gambaran mengenai proses yang dicapai dari pelaksanaan asesmen lanjutan.

Kegiatan asesmen lanjutan dilakukan dengan wawancara mendalam antara praktikan dengan Ketua Dusun 3, Ketua RW 6, Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong, dan Kepala Sekolah MI An-Nur 2. Melalui wawancara mendalam, praktikan mendapatkan informasi tentang permasalahan kurangnya kesadaran tentang wilayah potensi rawan bencana khususnya di Kampung Tanjak Nangsi RW 6, Desa Malangbong. Praktikan memahami penyebab dan akibat munculnya permasalahan tersebut.

Kegiatan Asesmen juga dilakukan melalui kegiatan asesmen partisipatif yang menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) pada hari Kamis, 17 November 2023. FGD kali ini membahas tentang faktor penyebab, akibat, intervensi yang perlu dilakukan serta hasil yang ingin dicapai dari rencana intervensi. Dalam FGD kali ini praktikan menggunakan alat bantu atau tools berupa hipotesis etiologi. Dimana peserta yang hadir diarahkan untuk menuliskan faktor penyebab mengapa masalah terjadi di kertas meta card, kemudian peserta menempelkan kertas tersebut di kertas plano. Selanjutnya peserta menuliskan dampak masalah di kertas meta card dan menempelkan kertas tersebut di kertas plano. Hasil asesmen lanjutan terhadap permasalahan kurangnya kesadaran tentang wilayah potensi rawan bencana adalah sebagai berikut:

a. Fokus Permasalahan

Fokus utama yang menjadi sasaran dari permasalahan kurangnya kesadaran mengenai wilayah potensi rawan bencana melalui edukasi kesiapsiagaan bencana kepada kelompok rentan yaitu siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong.

b. Fokus Perubahan

Fokus perubahan yang telah disepakati yaitu peningkatan pengetahuan tentang potensi rawan bencana melalui edukasi kesiapsiagaan bencana di MI An-Nur 2 Malangbong.

c. Hasil Identifikasi Penyebab

Penyebab dari permasalahan kurangnya kesadaran mengenai wilayah potensi rawan bencana karena tidak adanya perhatian baik dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat mengenai kebencanaan.

d. Hasil Identifikasi Akibat

Akibat dari permasalahan kurangnya kesadaran mengenai wilayah potensi rawan bencana yaitu ketidaksiapan diri ketika bencana terjadi dapat menimbulkan banyak kerugian.

e. Hasil Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan permasalahan kurangnya kesadaran mengenai wilayah potensi rawan bencana yaitu Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.

Berdasarkan analisis lanjutan yang dilakukan oleh praktikan, praktikan bersama dengan target dan interest group mengidentifikasi sebab akibat menggunakan alat hipotesis etiologi dan intervensi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hipotesis Etiologi dan Hipotesis Intervensi

HIPOTESIS ETIOLOGI		HIPOTESIS INTERVENSI
<ul style="list-style-type: none"> • Karena faktor-faktor berikut terjadi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada perhatian dari pemerintah desa untuk dana kebencanaan 2. Pengetahuan tentang bencana rendah 3. Belum adanya simulasi bencana 		<ul style="list-style-type: none"> • Dengan demikian jika intervensi berikut dilaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan adanya alokasi dana kebencanaan Desa Malangbong 2. Penyuluhan mengenai edukasi kesiapsiagaan bencana 3. Melakukan kegiatan simulasi bencana
<ul style="list-style-type: none"> • Berakibat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar 2. Kurangnya pengetahuan mengenai wilayah potensi bencana 3. Ketidaksiapan diri ketika bencana terjadi 		<ul style="list-style-type: none"> • Maka hasil berikut dapat dicapai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kerugian akibat resiko bencana dapat diminimalisir 2. Meningkatkan pengetahuan mengenai bencana 3. Kesiapsiagaan diri saat meghadapai bencana meningkat

Dalam hasil Focus Group Discussion (FGD) disampaikan mengenai karakteristik siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong yang sebagian besar merupakan warga RW 06 Kampung Tanjak Nangsi. Mereka mempunyai karakteristik senang dan tertarik dengan hal-hal yang baru, selain itu tingkat keguyuban dan gotong-royong warga Kampung Tanjak Nangsi RW 06 masih kuat.

Sehingga, anak-anak tidak hanya bersosialisasi dengan teman sebaya mereka tetapi juga bersosialisasi dengan berbagai kalangan usia. Melihat hal tersebut, akhirnya diputuskanlah program ini. Sebab, jika target system yang disasarkan adalah orang dewasa, mindset mereka sebagian besar menganggap bencana sebagai suatu takdir. Maka dari itu, perlu penanaman pemahaman sejak dini mengenai kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana.

4.4 Perumusan Rencana Intervensi (Perencanaan Sosial)

Perumusan rencana intervensi pada dasarnya merupakan perencanaan strategis yang mensyaratkan pengumpulan data dan informasi secara luas, eksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta implikasi masa depan atas keputusan yang dibuat. Rencana intervensi sebaiknya memuat perencanaan strategis yang dapat memfasilitasi komunikasi, partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, serta membantu pembuatan keputusan secara tertib dalam pemecahan masalah (Bryson, 2018).

Praktikan bersama masyarakat kembali meninjau kembali isu strategis untuk menentukan derajat urgensinya. Selanjutnya, komunitas masyarakat diajak untuk merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan sistem sumber yang ada di komunitas masyarakat tersebut. Di rencana intervensi, praktikan meninjau kembali hasil asesmen dan menentukan prioritas isu sesuai kondisi di komunitas.

Tabel 4. 4 Jenis Bencana Desa Malangbong

No.	Jenis Bencana	Tahun Terakhir Terjadi
1.	Angin Puting Beliung	2022
2.	Tanah Longsor	2023
3.	Gempa Bumi	2022
4.	Banjir Periodik	2017

Berdasarkan peninjauan kembali hasil asesmen, disimpulkan bahwa masalah bencana yakni pengetahuan siswa-siswa MI An-Nur 2 RW 06 tentang bencana rendah, dan RW 06 berada di lereng Gunung Cakrabuana, menjadi masalah utama di RW 06 Kampung Tanjak Nangsi. Praktikan bersama masyarakat mengusung program "Sekolah Tangguh Bencana".

Praktikan menggunakan teknik technology of Participatory (ToP) untuk merumuskan rencana intervensi sehingga mencapai kesepakatan bersama dengan interest group dan target group. Kesepakatan tersebut terjalin dengan

menjaring aspirasi partisipan dan mencari solusi terbaik penyusunan rencana intervensi atau rencana tindak lanjut.



Gambar 4. 2 Pelaksanaan ToP

a. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah mengedukasi masyarakat kelompok rentan yaitu anak-anak utamanya siswa MI An-Nur 2 Desa Malangbong dalam menghadapi bencana, mengingat letak Malangbong yang berada di lereng Gunung Cakrabuana.

b. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu masyarakat RW 06 Kampung Tanjak Nangsi melalui siswa-siswa mengenali potensi bencana yang ada di Desa Malangbong.
- 2) Mengedukasi siswa mengenai potensi bencana yang ada di Desa Malangbong.
- 3) Mengetahui bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bencana.

c. Bentuk kegiatan dari Sekolah Tanggung Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan ke siswa-siswa MI An-Nur 2 Desa Malangbong mengenai bencana.
- 2) Melakukan permainan edukatif mengenai kebencanaan.
- 3) Melakukan simulasi bencana. Simulasi bencana yang digunakan adalah simulasi bencana gempa bumi.
- 4) Pemasangan *sign* jalur evakuasi dan *sign* titik kumpul.

d. Sistem partisipan untuk pelaksanaan program intervensi adalah sebagai berikut:

1) Sistem Inisiator

Sistem inisiator merupakan sekumpulan orang yang mempunyai inisiatif atau yang memprakarsai suatu program. Sistem inisiator disini adalah pekerja sosial.

2) Sistem pelaksana perubahan

Sistem pelaksana perubahan merupakan sekumpulan orang yang memberikan bantuan atas dasar keahlian yang berbeda-beda dengan sistem yang berbeda ukurannya. Sistem pelaksana perubahan dapat dikatakan merupakan sekumpulan professional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana. Sistem pelaksana perubahan dalam program ini adalah pekerja sosial dan tim Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.

3) Sistem Klien

Sistem klien adalah pihak-pihak yang memerlukan pertolongan, bantuan atau pelayanan dari pelaksanaan program. Sistem klien dalam program ini adalah masyarakat RW 06 Kampung Tanjak Nangsi khususnya Siswa-Siswi MI An-Nur 2 Desa Malangbong.

4) Sistem Pendukung

Sistem pendukung adalah pihak-pihak yang mendukung dalam pelaksanaan program. Sistem pendukung dalam program ini adalah Kepala MI An-Nur 2 Desa Malangbong, guru-guru MI An-Nur 2 Desa Malangbong, Kepala Desa Malangbong, Babinkamtibmas Desa Malangbong, Babinsa Desa Malangbong, dan Karang Taruna Desa Malangbong.

5) Sistem Kontrol

Sistem kontrol adalah pihak-pihak yang mengawasi, memeriksa dan mengendalikan suatu program. Sistem kontrol dalam program ini adalah praktikan.

6) Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan merupakan pihak-pihak yang secara konsisten terlibat dalam pelaksanaan program. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah praktikan, siswa-siswi MI An-Nur 2 Desa Malangbong, guru-guru

MI An-Nur 2 Desa Malangbong, dan tim Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.

7) Sistem Sasaran

Sistem sasaran adalah pihak-pihak yang ditetapkan sebagai target utama dalam pelaksanaan program. Sistem sasaran pada program ini adalah siswa MI An-Nur 2 Desa Malangbong.

8) Sistem Aksi

Sistem aksi adalah pihak yang bergerak memulai sesuatu atau bertindak dalam pelaksanaan program. Sistem aksi pada program ini adalah praktikan.

e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang program Edukasi Kesiapsiagaan Bencana kepada Siswa-Siswi MI An-Nur 2 Desa Malangbong. Berikut rincian rancangan biaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan yaitu:

Tabel 4. 5 Rencana Anggaran Biaya

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Pemateri	1	Rp. 200.000	Rp. 200.000
2.	Konsumsi	16	Rp. 10.000	Rp. 160.000
3.	Sign Jalur Evakuasi	2	Rp. 50.000	Rp. 10.000
4.	Sign Titik Kumpul	1	Rp. 75.000	Rp. 150.000
Total				Rp. 520.000

f. Analisis SWOT

Uji kelayakan program merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan ancaman dari suatu program. Uji kelayakan program juga digunakan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk serta memastikan program dapat berjalan dengan baik.

Uji kelayakan program “Sekolah Tangguh Bencana” menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai aspek dalam suatu program/perusahaan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat mengurangi kelemahan dan ancaman (Pinayani, Strategi Pengembangan Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, 2014). Fungsi analisis SWOT adalah mengidentifikasi segala aspek yang menguatkan suatu

program, melemahkan program, membuka kesempatan program terhadap suatu perubahan, dan menjabarkan segala ancaman yang akan dihadapi.

Tabel 4. 6 Analisis SWOT Program Sekolah Tangguh Bencana

Faktor Internal	Strength : 1. Siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong memiliki semangat dan antusias yang tinggi terhadap pelaksanaan program 2. Adanya dukungan dari Kepala Sekolah MI An-Nur 2 Malangbong 3. MI An-Nur 2 Malangbong terbuka menerima perubahan	Weakness : 4. Siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong belum memiliki pengetahuan tentang bencana.
Faktor Eksternal		
Opportunities : 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Malangbong. 5. Adanya dukungan dari Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.	Strategi SO : 6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Malangbong, Satgas Kebencanaan Kecamatan, dan Kepala Sekolah MI An-Nur 2 Malangbong untuk mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana	Strategi WO : 1. Mengundang narasumber yang ahli dalam bidang kesiapsiagaan bencana. 2. Mengedukasi siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong agar dapat mengikuti kegiatan mitigasi bencana dengan baik
Threats : 1. Output agar siswa-siswi bisa mengetahui kesiapsiagaan di lingkungan sekolah.	Strategi ST : 1. Memberikan materi yang sederhana tentang bagaimana menghadapi bencana di sekolah. 2. Menggunakan penyampaian komunikasi dua arah saat pemberian materi.	Strategi WT : 1. Menggunakan permainan edukasi yang menarik bagi siswa-siswi sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan analisis kelayakan pada Program Edukasi Kesiapsiagaan Bencanakepada Siswa MI An-Nur 2 Desa Malangbong layak untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kekuatan dan peluang program yang dimiliki lebih banyak daripada kelemahan dan ancaman program. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman pada program ini dilakukan melalui strategi-strategi yaitu saat ancaman eksternal bertemu dengan kekuatan internal dilakukan strategi ST, saat ancaman bertemu dengan kelemahan dapat dilakukan strategi WT, lalu jika kelemahan bertemu

dengan peluang program dapat dilakukan strategi WO, dan jika kekuatan dan peluang program bertemu dapat dilakukan strategi SO. Berdasarkan hal tersebut, rencana program dinyatakan layak untuk dilaksanakan supaya tujuan yang direncanakan dapat terwujud.

g. Langkah dan Jadwal

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pra Pelaksanaan

a) Melakukan Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh praktikan dengan menghubungi pihak-pihak yang nantinya dapat memberikan bantuan untuk kelancaran program kegiatan. Koordinasi secara terarah dengan menghubungi narasumber kegiatan dan Kepala Sekolah MI An-Nur 2 Desa Malangbong.

b) Mengurus Perizinan dan undangan Kegiatan

Perizinan serta pembuatan surat undangan dilakukan dengan berkoordinasi kepada aparaturnya pemerintahan desa, interest group, dan target group.

c) Menyiapkan Logistik

Praktikan menyiapkan tempat dan logistik terlebih dahulu dengan menyusun peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan intervensi serta mencatat seluruh perlengkapan agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan kegiatan disusun dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Tahap Pelaksanaan Intervensi

KEGIATAN EDUKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA KEPADA SISWA MI AN-NUR 2MALANGBONG			
Waktu : Jumat, 24 November 2023			
Tempat : MI An-Nur 2 Malangbong			
No.	Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab
1.	Persiapan Perlengkapan	08.00 – 09.00	Praktikan
2.	Acara Pembukaan	09.00 – 09.10	Guru
3.	Edukasi tentang macam-macam bencana	09.10 – 09.30	Pemateri dari Satgas Kebencanaan Kecamatan
4.	Game edukasi dan <i>ice breaking</i>	09.30 – 09.45	Praktikan
5.	Edukasi tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Bencana	09.45 – 10.10	Pemateri dari Satgas Kebencanaan Kecamatan
6.	Simulasi Bencana Gempa Bumi	10.10 – 10.30	Pemateri dari Satgas Kebencanaan Kecamatan
7.	Kuis Interaktif	10.30 - 10.35	Praktikan
8.	Penutupan	10.35 – 10.40	Guru

3) Tahap Pasca Pelaksanaan

a) Evaluasi Kegiatan

Setelah kegiatan dilakukan, praktikan selaku fasilitator bersama dengan partisipan dan panitia kegiatan melakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana kendala serta capaian yang telah didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan form evaluasi yang diisi bersama-sama dengan partisipan.

b) Testimoni Kegiatan

Testimoni merupakan bentuk pernyataan yang diberikan oleh sasaran kegiatan terkait pelaksanaan suatu kegiatan. Testimoni bertujuan untuk mengetahui perbandingan keadaan sebelum dan sesudah diadakannya kegiatan intervensi. Dalam hal ini, praktikan meminta testimoni dari

perwakilan tenaga pendidik dan narasumber yang telah melaksanakan kegiatan intervensi.

c) Penyusunan Laporan

Pelaporan kegiatan disusun oleh praktikan bersama dengan panitia pelaksana, memuat proses kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dengan disertakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

4.5 Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi adalah kegiatan dimana praktikan melaksanakan semua rencana kegiatan atau rencana intervensi yang telah disusun dan direncanakan sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Ada beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan program Edukasi Kesiapsiagaan Bencana kepada Siswa Satgas Kebencanaan Kecamatan yang dilaksanakan oleh praktikan. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari yaitu pada tanggal 24 November 2023 pukul 09.00 – 10.45 WIB dan diikuti oleh 120 siswa yang diselenggarakan di MI An-Nur 2 Desa Malangbong.



Gambar 4. 3 Pelaksanaan Intervensi

4.5.1 Proses Intervensi

Berikut merupakan proses dari kegiatan intervensi program “Edukasi Kesiapsiagaan Bencana kepada Siswa MI An-Nur 2 Desa Malangbong”:

- a. Penyuluhan Mengenai Kebencanaan dan Kesiapsiagaan Bencana
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Jumat, 24 November 2023 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini berlokasi di MI An-Nur 2 Desa Malangbong. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh panitia kegiatan yaitu

praktikan. Adapun sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa-siswi MI An-Nur 2 Desa Malangbong dengan narasumber yaitu tim Satgas Kebencanaan Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh interest group dan target group. Kegiatan edukasi yang disampaikan oleh narasumber menggunakan teknik lisan maupun tulisan. Penggunaan teknik lisan dilakukan dengan memberikan ceramah kepada peserta kegiatan, sedangkan teknik tulisan menggunakan power point sebagai media untuk menayangkan materi berupa teks dan video agar peserta kegiatan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Dalam kegiatan penyuluhan, narasumber memberikan informasi dan pemahaman kepada target group tentang macam-macam bencana, potensi rawan bencana yang ada di Desa Malangbong, serta langkah- langkah kesiapsiagaan bencana. Diakhir sesi acara, narasumber juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan pendapatnya sehingga nantinya dapat lebih memahami materi yang diberikan.

b. Simulasi Kesiapsiagaan Bencana

Pelaksanaan kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana dilaksanakan pada hari Jumat, 24 November 2023 pukul 09.00 - 10.30 WIB. Kegiatan berlokasi di MI An-Nur 2 Desa Malangbong. Dalam kegiatan ini menggunakan teknik penyuluhan dimana narasumber memberikan materi sebagai pemahaman kepada siswa-siswi tentang bagaimana caranya melakukan simulasi bencana. Kemudian setelah para siswa-siswi paham barulah simulasi dilakukan. Di dalam simulasi ini juga menggunakan game edukatif untuk mengetahui sejauh mana siswa-siswi memahami tentang materi kebencanaan yang telah diberikan. Tidak lupa juga ada kuiz interaktif berhadiah bagi siswa-siswi yang bisa menjawab.

4.5.2 Hasil Intervensi

Dari kegiatan intervensi yang telah dilakukan melalui penyuluhan dan simulasi, ada hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut, yaitu:

a. Target Group dan Interest Group memahami materi yang disampaikan narasumber

Kegiatan intervensi yang telah dilakukan memberikan dampak yang baik kepada target group. Dalam kegiatan tersebut dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan dan menyimak materi yang

diberikan. Kegiatan simulasi juga berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari keseriusan peserta dalam memperhatikan materi yang dicontohkan oleh pemateri. Pada saat sesi tanya jawab, target group juga aktif bertanya kepada narasumber kegiatan sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih jelas untuk dimengerti.

- b. Terjalin hubungan yang baik dengan Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.

Setelah kegiatan intervensi dilakukan, terjalin juga hubungan yang baik antara Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong dengan Pemerintah Desa Malangbong. Hal tersebut juga dapat dijadikan momentum untuk terus berkoordinasi dalam jangka panjang dalam usaha memberikan edukasi kebencanaan di Desa Malangbong.

- c. Adanya masukan yang positif dari partisipan kegiatan

Partisipan yang hadir memberikan tanggapan yang positif atas terlaksananya kegiatan edukasi dan simulasi yang telah dilaksanakan di MI An-Nur 2 Desa Malangbong. Beberapa partisipan yang diwawancarai memberikan pendapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat serta memberikan pemahaman tambahan tentang kebencanaan dan cara kesiapsiagaan bencana. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan pengetahuan baru agar siswa-siswi dapat menerapkan dan menyebarkan materi yang telah diberikan sebagai usaha pengedukasian masyarakat mengenai kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana.

4.6 Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah proses intervensi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah intervensi yang dilaksanakan berjalan lancar dan mencapai tujuan. Evaluasi dibagi mejadi dua evaluasi proses dan evaluasi hasil.

4.6.1 Evaluasi Proses

Evaluasi dilakukan pada Sabtu 2 Desember 2023 bersama dengan narasumber Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong, guru-guru MI An-Nur 2. Selama intervensi, siswa-siswa mengikuti kegiatan dengan antusias. Kendala yang ditemui adalah banyaknya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan sedangkan ruang kelas terbatas. Akibatnya, beberapa siswa tidak bisa berlindung di bawah meja sebagaimana yang diinstruksikan oleh narasumber bahwa saat simulasi siswa harus berlindung di bawah meja. Sebagai gantinya, siswa diinstruksikan

untuk melindungi kepalanya dengan tas. Jumlah guru yang hadir pada saat intervensi hanya empat orang, namun berhasil ditangani dengan dibantu tim Satgas Kebencanaan Kecamatan yang berjumlah 4 orang dan praktikan. Berdasarkan hasil evaluasi proses, praktikan tidak menemui kendala yang sampai menyulitkan kegiatan praktikum. Seluruh proses praktikum komunitas dari mulai inisiasi sosial hingga rujukan berjalan lancar.

4.6.2 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Berdasarkan kegiatan Sekolah Tangguh Bencana, program ditingkatkan intensitasnya mengingat MI An-Nur 2 terletak di daerah rawan bencana dan memasang titik kumpul dan jalur-jalur evakuasi di sekitar MI An-Nur 2 untuk tindakan preventif jika ada bencana. Evaluasi ini dilakukan pada Jumat, 2 Desember 2023 secara partisipatif bersama dengan Tim Satgas Kebencanaan, pihak MI An-Nur 2, Pemerintah Desa Malangbong yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan, dan perwakilan masyarakat RW 06 Kampung Tanjak Nangsi yang diwakili oleh bapak Ketua RW 06.

4.7 Terminasi dan Rujukan

4.7.1 Terminasi

Terminasi merupakan pemutusan hubungan antara praktikan dengan masyarakat Desa Malangbong. Terminasi dilaksanakan pada tahap akhir pelaksanaan praktikum yaitu pada tanggal 7 Desember 2023 di Kantor Desa Malangbong bersama dengan Kepala Desa Malangbong. Kegiatan yang dilakukan praktikan pada saat terminasi antara lain :

- a. Menyampaikan kepada pihak Desa Malangbong bahwa praktikum komunitas telah selesai.
- b. Menyampaikan hasil laporan kegiatan selama melakukan praktikum komunitas di Desa Malangbong khususnya di RW 06 Kampung Tanjak Nangsi.
- c. Menyerahkan plakat praktikum komunitas sebagai simbolisasi bahwa telah selesainya praktikum komunitas di Desa Malangbong kepada Kepala Desa Malangbong, sekaligus berpamitan dengan pihak-pihak terkait dan melakukan foto bersama .

- d. Melakukan permohonan maaf apabila selama praktikum di wilayah Desa Malangbong terdapat hal-hal yang tidak diinginkan serta tetap menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen di lokasi praktikum komunitas.



Gambar 4. 4 Lokakarya Desa

4.7.2 Rujukan

Rujukan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti program yang telah dilaksanakan kepada pihak yang bersangkutan. Rujukan ini dilakukan karena waktu pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Malangbong telah berakhir. Adapun pihak yang diberi rujukan untuk keberlanjutan program antara lain :

a. Pemerintah Desa Malangbong

Rujukan dilakukan kepada pemerintah Desa Malangbong sebagai pihak yang memiliki wewenang dan dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan terkait edukasi kesiapsiagaan bencana di Desa Malangbong pada umumnya dan di wilayah RW 06 pada khususnya. Praktikan berharap bahwa pemerintah Desa Malangbong dapat mendukung program dengan mengalokasikan dana kebencanaan yang dimana kegiatan ini nantinya adalah berupaya dalam pengedukasian kebencanaan sehingga masyarakat dapat memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana dan dapat meminimalisir kerugian akibat bencana. Rujukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama seluruh pihak sehingga kesejahteraan warga dapat meningkat.

b. Siswa-Siswi MI An-Nur 2 Mlangbong

Rujukan dilakukan kepada siswa-siswi MI An-Nur 2 Malangbong sebagai siswa yang dapat menyebarkan informasi minimal kepada orang tua dan keluarga terdekat mereka.

BAB V

REFLEKSI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

5.1 Penilaian Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Komunitas di Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut telah dilaksanakan sejak tanggal 31 Oktober - 10 Desember 2023. Dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas tidak lepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat bagi praktikan untuk menyelesaikan kewajiban Praktikum Komunitas tersebut mulai dari kegiatan pra lapangan, lapangan hingga pasca lapangan.

5.1.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas di Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, yaitu :

- a. Masyarakat Desa Malangbong terbuka dalam menerima praktikan
Masyarakat Desa Malangbong menerima praktikan dengan ramah tamah dan mau berkerjasama selama praktikum berlangsung. Masyarakat juga terbuka dengan saran yang diberikan praktikan dan selalu mendukung serta menghargai apapun yang menjadi masukan dari praktikan. Hal tersebut memotivasi praktikan untuk tetap bersikap optimis dan percaya diri tentang ide-ide yang akan disampaikan dalam pelaksanaan program.
- b. Dosen pembimbing yang supportif
Dosen pembimbing yang merupakan supervisor praktikan dalam melaksanakan kegiatan praktikum institusi menjalankan fungsi supervisi administratif, supportif dan edukatif. Hal tersebut mempermudah praktikan dalam melaksanakan kegiatannya dan mempermudah dalam penyusunan laporan karena praktikan mendapatkan arahan yang jelas dan memiliki pedoman pelaksanaan praktikum. Ketika ada hal-hal yang perlu di diskusikan terkait isu yang terjadi dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas, supervisor selalumenanggapi dan mendiskusikan hal-hal tersebut dan memberikan saran atau solusi terkait isu yang terjadi.
- c. Kelompok yang Kompak
Teman kelompok merupakan salah satu support system langsung bagi praktikan selama di lokasi praktikum. Kelompok praktikum yang ada di Desa

Malangbong merupakan kelompok yang solid karena saling bantu membantu dimanapun kegiatan praktikan.

d. Adanya Pedoman Praktikum Pelaksanaan

Praktikum Komunitas tidak lepas dari Pedoman Praktikum Komunitas Prodi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial. Dalam pedoman tersebut memuat langkah-langkah praktikum sejak awal hingga akhir terdapat penjelasan yang rinci beserta contoh sistematika penulisan laporan praktikum yang telah di muat dalam lampiran.

5.1.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil praktikum institusi yang telah dilaksanakan di Desa Samiran terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain :

a. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Praktikum

Pelaksanaan setiap tahapan tidak selalu sesuai dengan alokasi waktu dalam buku pedoman, hal ini disebabkan alokasi waktu yang sangat singkat dalam kegiatan Praktikum Komunitas. Praktikan juga selalu menyesuaikan pelaksanaan praktikum dengan matriks yang telah dibuat oleh praktikan, karena terdapat beberapa kegiatan yang bertabrakan dengan matriks praktikan. Dengan demikian, praktikan selalu dikejar oleh waktu sehingga memengaruhi kualitas informasi yang didapatkan oleh praktikan dari informan terkait.

b. Cuaca yang Kurang Mendukung

Memasuki musim hujan serta didukung kondisi geografis Desa Malangbong yang merupakan pegunungan membuat acara yang praktikan agendakan di Desa Malangbong sedikit terhambat. Hal ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi terkadang disertai angin sehingga masyarakat cenderung memilih dirumah saja.

c. Kurangnya dukungan Pemerintah Desa

Seluruh aparatur Desa Malangbong tidak memenuhi kualitas secara Sumber Daya Manusianya. Hal ini dapat terlihat dengan sulitnya mencari informasi data yang berkaitan dengan profil desa. Membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan data profil desa. Sikap acuh tak acuh yang diberikan kepada aparatur desa terhadap kehadiran praktikan di Desa Malangbong.

d. Politik Desa Malangbong yang Kuat

Terlalu banyak informasi yang ditutup-tutupi oleh pihak desa sehingga praktikan harus bekerja lebih keras membangun kepercayaan dengan masyarakat agar banyak mendapatkan informasi. Praktikan harus mampu memilah dan memilih informasi sebab informasi yang didapatkan seringkali kontradiktif antara satu informan dan informan lainnya.

5.2. Usulan dan Masukan untuk Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas

Berdasarkan pengalaman praktikan selama di lapangan terdapat beberapa usulan dan masukan untuk praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas agar menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum komunitas dapat dibekali dengan pengetahuan akan penggunaan teknologi sehingga memudahkan mahasiswa dalam berkegiatan di masyarakat atau di lapangan.
- b. Bimbingan pra praktikum sebaiknya dapat dioptimalkan mulai dari persiapan praktikum, pengerjaan tugas pra praktikum pembahasan substansi praktikum di sertai contoh praktik untuk memudahkan praktikan memahami dan tergambar proses praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas sehingga memudahkan praktikan untuk melaksanakan tahapan di masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Praktikum komunitas diadakan di tanggal 31 Oktober 2023 hingga 11 Desember 2023. Fokus lokasi praktikan berpraktik di RW 06 Kampung Tanjak Nangsi dan MI An-Nur 2 Malangbong.

Tahap awal yang dilaksanakan oleh praktikan adalah inisiasi sosial. Praktikan meminta izin kepada Pemerintah Desa Malangbong dan Ketua RW 06 Kampung Tanjak Nangsi untuk berpraktik. Hasilnya adalah praktikan mendapatkan izin dan dukungan dari pejabat desa dan ketua RW 06 Kampung Tanjak Nangsi.

Tahap kedua adalah pengorganisasian sosial. Praktikan mengidentifikasi organisasi yang ada di Desa Malangbong serta mengetahui karakteristik masyarakat Desa Malangbong. Hasilnya adalah praktikan bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan perubahan dan mendapatkan profil organisasi lokal yang ada di Desa Malangbong.

Di tahap asesmen, praktikan mencari tahu dan memahami permasalahan yang ada di RW 06 Kampung Tanjak Nangsi dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Dari tahap asesmen, praktikan memilih fokus kesiapsiagaan bencana bagi siswa SD karena berdasarkan hasil asesmen bersama dengan pengurus RT, RW, dan PKK, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang bencana. Intervensi yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana di MI An-Nur 2 Malangbong dengan mengundang narasumber dari Satgas Kebencanaan Kecamatan Malangbong.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Desa Malangbong dan MI An-Nur 2 Malangbong.

a. Pemerintah Desa Malangbong

- 1) Memperluas kerjasama baik dengan instansi pemerintahan maupun swasta untuk mengedukasi masyarakat mengenai bencana mengingat Desa Malangbong mempunyai berbagai macam ancaman bencana.
- 2) Mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat dan anak-anak.

b. MI An-Nur 2 Malangbong

- 1) Lebih sering mengadakan kegiatan manakrida yang mengedukasi seperti simulasi bencana dengan mengundang narasumber dari luar.
- 2) Memasang tanda-tanda jalur evakuasi di MI An-Nur 2 Malangbong.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, S. F., & Tracy, E. M. (2008). Developing Student Knowledge And Skills For Home-Based Social Work Practice. *Journal of Social Work*, 125-143.
- Arsyad, Ir. K. M., M.Sc. 2017. Modul Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Bandung : Kementerian PUPR 2017.
- Bintarto. 1986. Desa-Kota. Bandung : Alumni.
- BNPB. 2022. Indeks Resiko Bencana 2022. Jakarta Timur : Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
- Budiraayu, Tuti. (2019). Kajian Sosiologis tentang Kebencanaan Kaitannya dengan Penguatan dan Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Bencana Alam. *Talenta Conference Series Local Wisdom Social and Arts*, 2(1), 1-8. doi:<http://dx.doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.641>
- Hermon, D. 2012. Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Putting Beliang, Kekeringan, Padang : UNP PRESS.
- Isnainiati, N., Mustam, M., & Subowo, A. (2014). Kajian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Management Review*, 25-34.
- Muslim, Aziz. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mustofa, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Melalui Komunikasi dan Edukasi. Diambil kembali dari Pascasarjana UNISMA:
- Nurjanah. 2012. Manajemen Bencana. Bandung : Alfabeta
- Putuharu, F. 2015. Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber lain :

- Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kegiatan Praktikum

No.	Waktu	Kegiatan	Sasaran	Tools	Indikator
Pra Lapangan					
1.	25 – 27 Oktober 2023	Pembekalan Bimbingan Pra Lapangan	Praktikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan dengan narasumber 2. Pertemuan dengan supervisor 3. Studi Literatur (Kajian tentang Sistem Pemerintahan Lokal/Desa, Kajian tentang Praktik Pekerja Sosial dalam Komunitas/Masyarakat, dll) 4. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Praktikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktikan mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang praktikum komunitas 2. Tersusunnya makalah tentang Sistem Pemerintahan Lokal/Desa, Kajian tentang Praktik Pekerja Sosial dalam Komunitas/Masyarakat. 3. Terselenggaranya a kegiatan supervise 4. Tersusunnya matriks rencana kerja praktikum
Lapangan					
2.	31 Oktober 2023	Penyerahan Mahasiswa Praktikan kepada Bupati	Praktikan	Mendengarkan pemaparan materi yang diberikan Bupati Kabupaten Bandung	Mendapatkan izin secara resmi dari aparat desa untuk melakukan praktikum komunitas di lokasi tersebut serta memahami keadaan Kabupaten Garut untuk melaksanakan praktikum
3.	31 Okt – 4 Nov 2023.	Melakukan inisiasi sosial	Aparat desa dan RW serta tokoh masyarakat	Small Talk/percakapan sosial/wawancara dan Home Visit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah relasi untuk mendukung terlaksananya program intervensi oleh praktikan 2. Menjadi sistem sumber terdekat
4.		Melakukan Pengorganisasian sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Lokal 2. Target Group 3. Interest Group 		

5.		Asesmen Awal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Aparat Kelurahan 3. Organisasi Lokal 4. RT/RW 5. Tokoh Masyarakat 	Methodology Participatory of Assessment (MPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi masalah dan potensi sumber 2. Teridentifikasi prioritas/isu komunitas yang akan di intervensi 3. Teridentifikasi lembaga/program
		Asesmen Lanjutan		Wawancara, Home Visit, Community Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis permasalahan lebih dalam (mencari sebab akibat, populasi terdampak, upaya yang sudah/ pernah dilakukan, faktor pendukung dan penghambat) 2. Merumuskan perubahan yang diperlukan yang sesuai dengan fokus masing-masing praktikan. 3. Menganalisa sumber-sumber yang relevan untuk mendukung upaya perubahan.
6.	12 – 18 Nov 2023	Perumusan Rencana Intervensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Organisasi Lokal yang relevan 3. RT/RW 4. Tokoh Masyarakat 	Technology of Participation (TOP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana intervensi komunitas 2. Terbentuknya tim kerja masyarakat (TKM) 3. Terbentuknya komitmen masyarakat/janji hati
7.	23 Nov 2023	Pelaksanaan Intervensi		Aksi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelaksanaan intervensi 2. Terselenggaranya pendampingan sosial oleh praktikan dalam setiap langkah-langkah intervensi
8.	4 Des 2023	Evaluasi		Community Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Community Meeting dalam rangka monitoring dan evaluasi

					partisipatif kegiatan praktikum 2. Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan praktikum
9.	7 Des 2023	Lokakarya	Praktikan dan Dosen Pembimbing		Terpaparnya hasil pelaksanaan praktikum komunitas selama 40 hari.
10.		Terminasi dan Rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Organisasi Lokal yang relevan 3. RT/RW 4. Tokoh Masyarakat 5. Kepala Desa 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan praktikum 2. Berkelanjutannya program intervensi yang sedang dibuat bersama masyarakat

Lampiran 2 Instrumen Profil Komunitas

INSTRUMEN PEMBUATAN PROFIL KOMUNITAS PADA PRAKTIKUM KOMUNITAS DI DESA MALANGBONG

1. Identifikasi Latar belakang Desa
 - A. Bagaimana sejarah berdirinya desa Malangbong?
 - B. Seperti apa gambaran geografis Desa Malangbong?
 - C. Bagaimana Perkembangan masyarakat Desa Malangbong?
 - D. Bagaimana Struktur organisasi Desa Malangbong?
2. Identifikasi Tujuan dan Visi Komunitas
 - A. Apa tujuan utama dari komunitas ini?
 - B. Apa visi jangka panjangnya?
 - C. Bagaimana Komunitas ini ingin memengaruhi atau memberdayakan anggotanya?
3. Identifikasi Anggota Komunitas
 - A. Siapa saja anggota komunitas ini?
 - B. Apa latar belakang, keahlian, dan minat utama mereka?
 - C. Bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain?
4. Identifikasi Struktur Organisasi
 - A. Apakah ada Struktur organisasi atau hierarki di dalam Komunitas?
 - B. Siapa pemimpin atau pengelola komunitas?
 - C. Bagaimana Proses pengambilan keputusan diatur?
5. Identifikasi Aktivitas Komunitas
 - A. Apa kegiatan atau acara yang sering diadakan?
 - B. bagaimana komunitas berkomunikasi dan berinteraksi?
 - C. Apa platform atau saluran yang digunakan?
6. Identifikasi Nilai dan Budaya
 - A. Apa nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas?
 - B. Bagaimana budaya komunitas ini dibentuk?
 - C. Bagaimana Komunitas menanggapi perbedaan dan konflik?
7. Identifikasi Sumber Daya
 - A. Apa sumber daya yang tersedia dalam komunitas (finansial, manusia, teknologi)?
 - B. Bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk mendukung tujuan komunitas?

Lampiran 3 Berita Acara Penerimaan Mahasiswa



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
 Jalan Ir.H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
 Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 2953/9.7/K.S.01.01/10/2023 Bandung, 30 Oktober 2023
 Lampiran : Susunan Acara
 Sifat : Penting
 Hal : **Penerimaan Mahasiswa
 Praktikan di Pendopo Bupati Garut**

Kepada :
**Mahasiswa Praktikum Komunitas
 Prodi Lindayasos
 di
 Tempat**

Dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Praktikum Komunitas Angkatan 2020 Prodi
 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung di Pendopo Bupati
 Garut ,seluruh mahasiswa wajib hadir pada :

Hari/ tanggal : Selasa/ 31 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 – 11.00 WIB.
 Tempat : Pendopo Bupati Kab.Garut
 Jl. Kiarasantang No. 2 Regol,
 Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ketua Prodi
 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Catatan :
 Pakaian : kemeja dengan jas almamater

Lampiran 4 Berita Acara Kegiatan Pembekalan Praktikum Komunitas



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jl. Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, Fax. : (022) 2502962

PENGUMUMAN

Nomor : 2951/9.7/KS.01.01/10/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Komunitas Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** mengikuti kegiatan Pembekalan Praktikum Komunitas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu - Jumat, 25-27 Oktober 2023
Waktu : Pk. 13.00 – 16.00 WIB (Rabu-Kamis, 25-26 Oktober 2023)
Pk. 08.30 - 11.30 WIB (Jumat, 27 Oktober 2023)
Materi : Peningkatan Kompetensi Mahasiswa pada Praktikum Komunitas
Tempat : Kelas D.1.2 / D.1.3 (Rabu dan Kamis)
Auditorium Poltekesos (Jumat)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

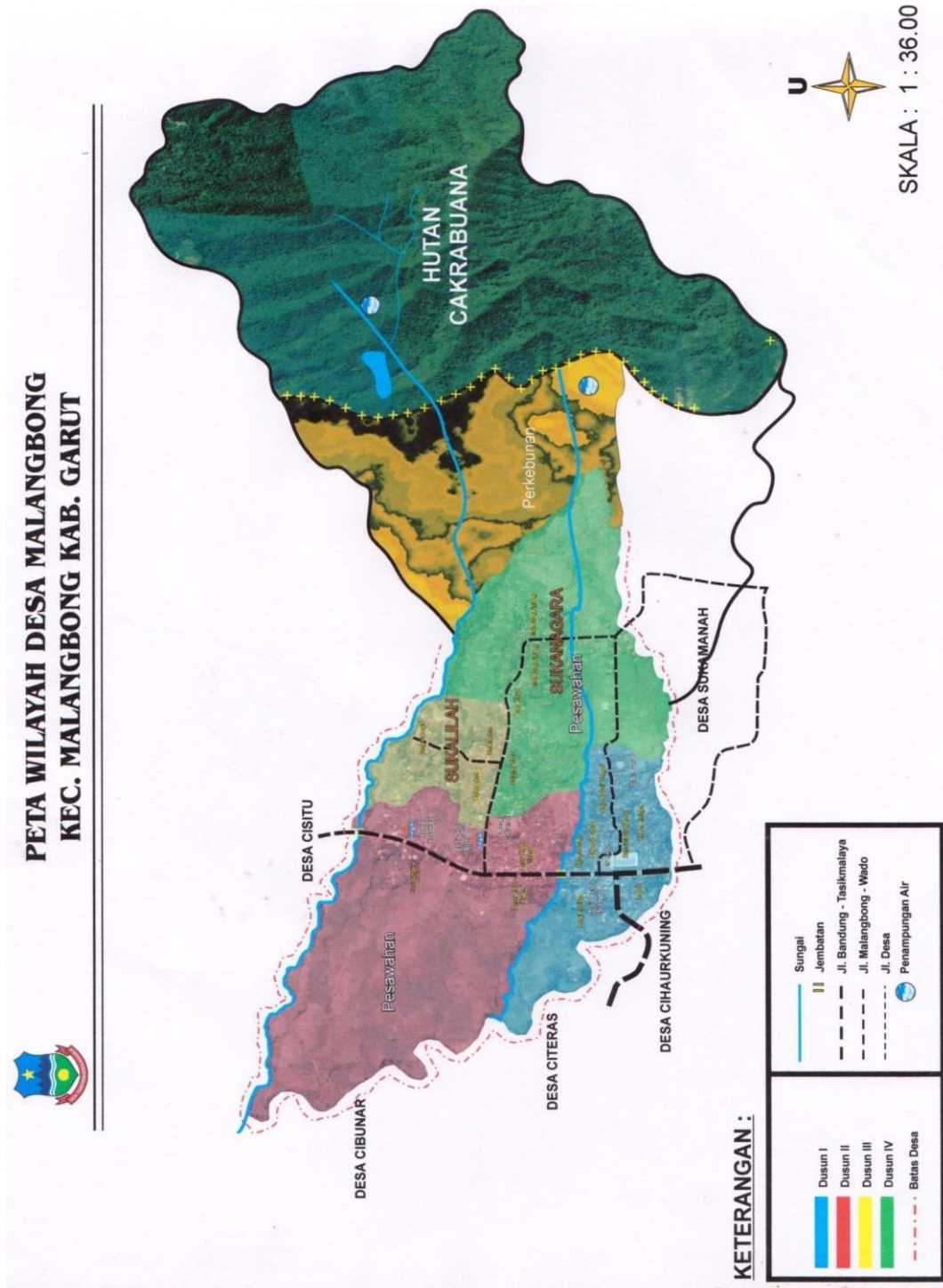
Bandung, 22 Oktober 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial




Dina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 5 Peta Lokasi Praktikum



Lampiran 6 Skenario Pertemuan Warga dan Notulensi (Asesmen)

SKENARIO PELAKSANAAN MPA

Hari/tgl : Selasa, 7 November 2023
 Tempat : Aula Kantor Desa Malangbong
 Waktu : 10.00 – 12.00
 Partisipan

1. Aparat Dan Perangkat Desa
2. Kader Pkk
3. Tokoh Masyarakat
4. Karang Taruna
5. Kepala Dusun
6. Ketua Rw.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi penyebaran undangan kepada partisipan dan penyiapan perlengkapan. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Daftar hadir | 6. Pulpen |
| 2. Berita acara | 7. Spidol |
| 3. Kertas plano | 8. Map |
| 4. Masking tape | 9. LCD |
| 5. Meta card | 10. Mic dan speaker |

2. Tahap pelaksanaan

- A. Praktikan membuka dengan salam dan mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah datang.
- B. Pratikan menyampaikan maksud, tujuan dan proses pelaksanaan MPA. Tujuan mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang ada di masyarakat dan organisasi.
 - 1) Masalah adalah : Sesuatu atau keadaan yang membuat resah masyarakat atau membuat tidak nyaman yang dirasakan bersama atau ditemui.sehari-hari.
 - 2) Kebutuhan adalah : Sesuatu yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Potensi dan Sumber : Kemampuan, kekuatan yang ada di masyarakat baik alamiah, formal atau non formal seperti institusi yang ada di masyarakat, dana, SDM, waktu, sarana dan prasarana, sistem nilai, dan sebagainya.
 - 4) Langkah-langkah MPA : Identifikasi masalah, pengkategorian, sebaran, prioritas, potensi dan sumber, TKM, janji hati.
- C. Praktikan memberikan meta card dan pulpen.
- D. Praktikan memfasilitasi audiens untuk memetakan terlebih dahulu PPKS yang ada di Desa Malangbong. Hasil pemetaan adalah sebagai berikut:

Jenis PPKS	Data Sebenarnya	Hasil Jangkauan Mahasiswa	DTKS
Fakir Miskin	313	101	101
Korban Bencana	79	13	13
Pemulung	7	4	4
PRSE (RW 06)	22	22	19

- E. Praktikan memberikan waktu kepada partisipan untuk memikirkan dulu masalah, potensi dan sumber.

- F. Partisipan menuliskan masalah.
 G. Partisipan menempelkan meta card yang berisikan permasalahan
 H. Partisipan dengan mengkategorikan masalah dengan bantuan praktikan.
 I. Partisipan mengidentifikasi persebaran dengan bantuan praktikan.

Hasil dari identifikasi masalah dan pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

Sosial	Lingkungan	Kesehatan	Kebencanaan
Terdapat banyak janda miskin	Sampah Berserakan	Tingginya angka stunting	Terdapat bencana banjir periodik
Tingginya angka kemiskinan	Tidak ada pengelolaan sampah tingkat RT/RW	Tingginya angka catin atau ibu yang mengalami KEK	Sering terjadi bencana longsor dan gempa bumi
Belum ada kelompok usaha bersama (KUBE)	Program Harum Madu belum berjalan optimal	Terdapat bayi kurang gizi	Pernah terjadi bencana angin puting beliung
Masyarakat belum pernah mendapatkan pemberdayaan	Budaya membuang sampah di sungai	Tingginya angka TBC	Tingginya angka korban bencana alam
	Sanitasi buruk	Penyintas TBC sulit dijangkau dan diberi penanganan	
	Masih terdapat rumah pengguna MCK atau Jamban		

- J. Menentukan prioritas permasalahan yang akan ditangani dengan pertimbangan waktu, sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat dan praktikan. sehingga didapat prioritas masalah yang harus diselesaikan adalah:
- 1) Tingginya angka anak stunting
 - 2) Kemiskinan yang menimpa fakir miskin atau janda
 - 3) Wabah TBC
 - 4) belum ada pengolahan dan pengelolaan sampah pada tingkat RT/RW
 - 5) Tingginya angka korban bencana alam
- K. Identifikasi sumber dan potensi yang ada di Desa Tambakbaya. Dengan hasil pemetaan sebagai berikut:

SDA	SDM	Kelembagaan
Lahan pertanian (padi, singkong, ubi)	Masyarakat terbuka untuk menerima perubahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Lahan perkebunan (cabai, tomat, rempah-rempah, sayur mayur).	Rata-rata masyarakat berpendidikan SLTA/SMA	Kelompok Wanita Tani (KWT)
Peternakan ikan, unggas, kambing/domba, dan sapi	Masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi.	Kampung Siaga Bencana (KSB)
Sungai	Budaya gotong royong masih kental di dalam masyarakat.	Karang Taruna
		Bank Sampah
		Kader TBC
		BUMDes

- L. Penandatanganan janji hati.

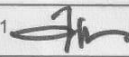





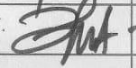
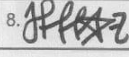


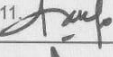
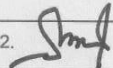
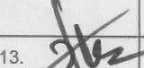

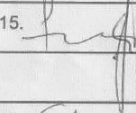

3. Tahap Pengakhiran

Pembacaan Kesimpulan, penutup dengan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kemudian dilanjutkan dengan sesi dokumentasi.

Lampiran 7 Daftar Hadir Lokakarya

Daftar Hadir Kegiatan
Praktikum Komunitas
Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2023

Nama Kegiatan : LOKAKARYA DESA MALANGBONG
Tanggal Kegiatan : 7 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ai Dedeh	TP plk ds	1. 
2.	A. Hadro	Karang Taruna	2. 
3.	Yoni - S.	Plk.	3. 
4.	AIDAH	KADER / K	4. 
5.	Yonhi Nurani	BSM. Saung Bersani	5. 
6.	Roro Rohendi	KADUS. III	6. 
7.	Sp. Lutfah .	Ketua RW 4	7. 
8.	KMAS KOMARIAH	KADER	8. 
9.	T. Hualudin	Kadus I	9. 
10.	Adang	Kadus.	10. 
11.	Armila Sofi	Perangkat Desa	11. 
12.	Uiso Lihm	P. Des	12. 
13.	Suhendur	KADUS II	13. 
14.	Amin Hartin	Kasi Polyan	14. 
15.	Ling Favourita	Pembimbing	15. 
16.			16.
17.	Stew Oliver Kathleen	mahasiswa	17. 

Lampiran 10 Daftar Hadir Pelaksanaan Intervensi

Daftar Hadir Kegiatan
Praktikum Komunitas
Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2023

Nama Kegiatan :
Tanggal Kegiatan : 23 - November 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ai Dedeh	KTTP Pkcs	1.	
2.	Sigitanti	Gizi Pkcs		2.
3.	Sri. Lutfiah	Ketua Pokja IV	3.	
4.	IMAS KOMARIAH	KADER		4.
5.	AIDATI	KADER	5.	
6.	APONG	KDR		6.
7.	Siti Rohmah	KADR.	7.	
8.	Siti Yuhandah	Kader		8.
9.	IMAS NURHAYATI	Kader	9.	
10.	NENDEN	KODOR.		10.
11.	WAWAT S	KADER	11.	
12.	DEDE KARYATI	Kader		12.
13.	Endrian Yaanda	Kader	13.	
14.	Husein Maulana	II		14.
15.	Sukcesih	II	15.	
16.	Dele. Komariah	II		16.
17.	Orti Suciati	KADER	17.	

Lampiran 15 Dokumentasi Kegiatan Akademik

Penjajagan Lokasi Praktikum



Penerimaan Mahasiswa di Pendopo Kabupaten Garut



Penerimaan Praktikan di Desa



Inisiasi Sosial



Pengorganisasian Sosial



Asesmen Awal



Asesmen Lanjutan



Wawancara bersama Bidan Desa



Perumusan Rencana Intervensi



Lokakarya Praktikum Komunitas Di Desa

Kegiatan Memasak Nugget Tempe



Lokakarya Praktikum Komunitas Di Kabupaten Garut



Supervisi Lembaga 1



Supervisi Lembaga 2



Supervisi Dosen Pembimbing 1



Supervisi Dosen pembimbing 2

